



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2025

DIREKTORAT
PENGOLAHAN

DIREKTORAT
JENDERAL
PENGUATAN DAYA
SAING

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Pengolahan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2025 adalah Rancangan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Kegiatan utama Direktorat Pengolahan yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP yaitu, a) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk KP (%), (b) Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan yang memenuhi tahapan proses perumusan SNI (%), (c) Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP (%), (d) Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton), (e) Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (%). Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 105,61% (kategori baik). Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Direktur Pengolahan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si

Tim Penyusun

PENGARAH

Direktur Pengolahan

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Pengolahan

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Pengolahan,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pengolahan selama Triwulan III Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Pengolahan melakukan pengukuran terhadap kegiatan Pengolahan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan; (2) Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 3 IKK bersifat tahunan, 5 IKK bersifat triwulan, 3 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI, Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP, Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Indikator yang bersifat semesteran adalah Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan,

Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan, Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, sebelas (11) Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan III adalah sebesar 105,61 (kategori baik). Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang targetnya ada pada Triwulan III. Adapun rincian capaian periode triwulan III yaitu sebagai berikut :

- IKK Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%); target 75%; capaian 75% atau 100% dari target.
- IKK Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (%); target 23%; capaian 28,31% atau 120% dari target.
- IKK Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (%); target 33%; capaian 33,52% atau 101,58% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 100% atau 105,26% dari target.

Berdasarkan surat persetujuan revisi dari Direktorat Anggaran bidang Perekonomian dan Kemaritiman, DJA, Kemenkeu Nomor S-778/AG/AG.3/2025 tanggal 9 September 2025, Direktorat Pengolahan mendapatkan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp 11.705.464.000, dari anggaran awal sebesar Rp 15.528.807.000, pagu efektif Rp.3.823.343.000. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp 1.032.094.142,- atau setara dengan 26,99% dari pagu setelah AA. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai selama Triwulan III Tahun 2025 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran

yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan III Tahun 2025, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Tim Penyusun	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud dan Tujuan	2
1.3.Tugas dan Fungsi	2
1.4.Keragaan Sumberdaya Manusia	3
1.5.Permasalahan Utama	4
1.6.Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1.Rencana Strategis	7
2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1.Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan	11
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	13
IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	13
Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	37
IK 4. Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	37
IK 5. Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	42
IK 6. Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah	53
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	62
IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	62
IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan	63
IK 9. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan	64
IK 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	66

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	67
3.3. Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi	71
4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan Sebelumnya Tahun 2025	71
4.4. Lampiran	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025	9
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025	12
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	14
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI	24
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP	33
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan.....	38
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	43
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah.....	54
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	62
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan.....	63
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan	64
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan.....	66
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan	3
Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia.....	4
Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.....	6
Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW III Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku	11
Gambar 5. Pembinaan PT. Hidayat Bahari Sejahtera (HBS)	16
Gambar 6. Pembinaan dan Monitoring UPI Skala Mikro dan Kecil di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah	16
Gambar 7. Pembinaan UMKM dan Identifikasi Potensi Perikanan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara	17
Gambar 8. Pembinaan Penanganan dan Pengolahan Ikan Asin Skala Mikro dan Kecil di Kalibaru – Jakarta Utara	18
Gambar 9. Webinar Kupas Tuntas Legalitas Izin Edar Produk Perikanan	18
Gambar 10. Webinar Kupas Tuntas Masa Simpan Produk Perikanan.....	19
Gambar 11. Webinar Kupas Tuntas Pengolahan Surimi dan Produk Turunannya	20
Gambar 12. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Klinik Mutu.....	21
Gambar 13. Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Kinerja UPI Pengolahan Patin	22
Gambar 14. Monev Pemanfaatan Pabrik Rumput Laut	22
Gambar 15. Sharing Session Ekonomi Sirkular dalam Industri Perikanan.....	23
Gambar 16. Bimbingan Teknis Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan	26
Gambar 17. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pelaksanaan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan	27
Gambar 18. Rapat Kaji Ulang SNI Produk Perikanan.....	27
Gambar 19. Pemantauan Penerapan dan Kaji Ulang SNI di Kab. Bekasi.....	28
Gambar 20. Koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UPI Skala Mikro Kecil Produk Perikanan	29
Gambar 21. Webinar Sosialisasi Halal dengan tema Optimalisasi Pendampingan dalam mendukung Kebijakan Sertifikasi Halal	30
Gambar 22. Melakukan Pembahasan potensi indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan di wilayah Jawa Tengah.....	31
Gambar 23. Rapat Konfirmasi Dokumen RSNI Pedoman Pengujian Sensori pada Hasil Perikanan	32

Gambar 24. Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Cara Produksi Garam yang Baik (CPGB) dengan Metode Evaporasi Terbuka.....	32
Gambar 25. Training Audit Internal Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) ...	35
Gambar 26. Training Pembina Mutu <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)...	36
Gambar 27. Pelaksanaan Verifikasi <i>Quality Management System</i> (QMS).....	36
Gambar 28. <i>Sharing Session</i> Kegiatan Sebagai Observer Inspeksi UPI.....	37
Gambar 29. Persiapan Pendataan Utilitas dan Volume Produk UPI Menengah Besar 2025 40	
Gambar 30. Sosialisasi Pendataan Volume Produk Olahan UPI Mikro-Kecil pada Kegiatan Workshop satu data bidang PDSPKP tahun 2025.....	41
Gambar 31. Monitoring dan Updating Pendataan VPO Skala Mikro Kecil Tahun 2025 (Semester I tahun 2025)	42
Gambar 32. Rapat Pembahasan Calon Penerima Bantuan Pemerintah <i>Chest Freezer</i> Tahun 2025.....	45
Gambar 33. Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Peralatan Pengolahan Tahun 2025	45
Gambar 34. Rapat Persiapan Pengadaan Sarana Rantai Dingin <i>Chest Freezer</i> TA 2025 Tahap I.....	46
Gambar 35. Rapat Pembahasan Paket dan Spesifikasi Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan TA 2025.....	47
Gambar 36. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengadaan <i>Chest Freezer</i> (CF) Tahap 1.....	48
Gambar 37. Koordinasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah <i>Chest Freezer</i> Tahun 2025 Tahap II	49
Gambar 38. Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis Daerah untuk Penyaluran <i>Chest Freezer</i> Tahap 1.....	50
Gambar 39. Rapat Finalisasi Revisi Petunjuk Teknis Peralatan Pengolahan TA 2025.....	51
Gambar 40. Rapat Koordinasi dengan Dinas Kabuten/Kota Calon Lokasi Penerima Bantuan <i>Chest Freezer</i> Tahun 2025 Tahap II.....	52
Gambar 41. Rapat Koordinasi Penetapan Calon Lokasi dan Persiapan Pengadaan Bantuan <i>Chest Freezer</i> Tahun 2025 Tahap II.....	53
Gambar 42. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Tempura Udang	56
Gambar 43. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Sirup Rumput Laut	57
Gambar 44. Workshop Ngolah Ikan Bersama Gen Z : Sambal Ikan	58

Gambar 45. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Bakso Udang.....	58
Gambar 46. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Kamaboko	59
Gambar 47. Rapat Kolaborasi Penanganan dan Pengolahan Ikan Dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	60
Gambar 48. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : <i>Cookies</i> Rumput Laut	60
Gambar 49. Rapat Persiapan Pelatihan Penanganan dan Pengolahan Ikan Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	61
Gambar 50. Rapat Monev Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Rumput Laut	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Pengolahan merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang mengejawantahkan dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029 yang disusun sebagai acuan kegiatan dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pengolahan turut serta menyusun Perjanjian Kinerja yang mencakup turunan dari Draft Renstra 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu, Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%), Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%), dan Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP (%). Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan pada indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan menyusun “Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Pengolahan 2025”.

1.2.Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan publik;
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3.Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 02/PERMENKP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengolahan.

Direktorat Pengolahan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 7 Tim Kerja, sebagai berikut :

- a. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar;
- b. Tim Kerja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan;
- c. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan;
- d. Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah;
- e. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar;
- f. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil;
- g. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

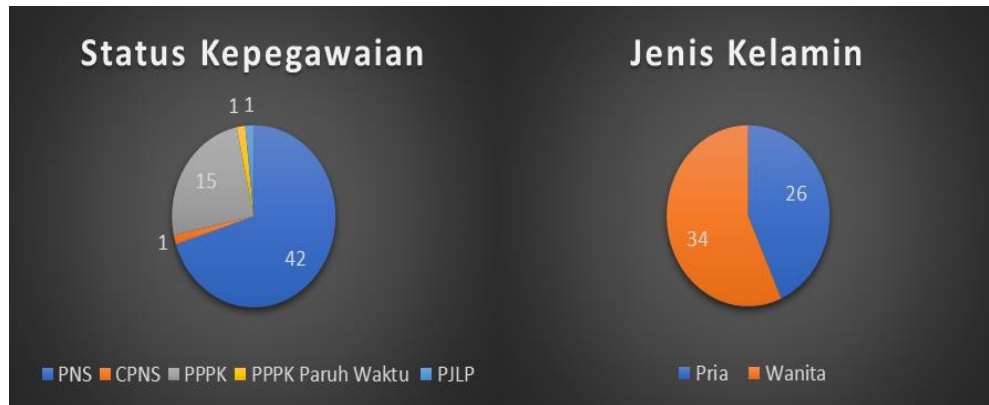


Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan

1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan pada Tahun 2025 berjumlah 60 orang dengan komposisi 42 orang PNS, 1 orang CPNS, 15 orang PPPK, PPPK Paruh Waktu 1 orang, dan 1 orang PJLP. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 26 orang dan Wanita sebanyak 34 orang. Sedangkan berdasarkan jabatan fungsional, jumlah Analis Mutu Hasil Perikanan Pertama sebanyak 1, Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama sebanyak 9 orang, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan sebanyak 27 orang, Penata Perizinan sebanyak 1 orang, Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 orang, Pranata Keuangan APBN Terampil sebanyak 1 orang, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 1 orang.



Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Ke depan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi perlu terus digenjot, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

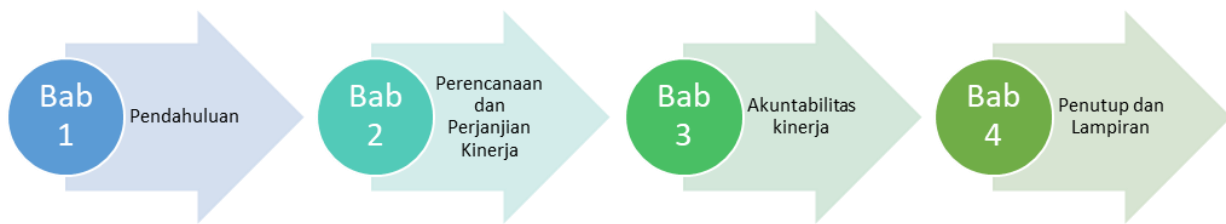
Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 81.350 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.475 unit (Direktorat Pengolahan, 2024). Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalan dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerjasama UPI.

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan kelautan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas Ditjen PDSKP dapat mengakomodasinya, melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk KP, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk KP di pasar potensial dalam dan luar negeri.

1.6.Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan

dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Triwulan III Tahun 2025. Pencapaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan III Tahun 2025 diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rancangan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi KKP, yaitu:

”Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi KKP :

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

Tujuan KKP :

1. meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Sedangkan Rancangan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

“Terwujudnya Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai Pilar Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

Rancangan Misi DJPDS :

1. Meningkatkan kontribusi produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar dalam sebagai sumber pangan masyarakat dan di pasar luar negeri sebagai sumber penghasil devisa negara
2. Menjaga keberlangsungan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan nasional untuk terus berperan sebagai penggerak sistem bisnis kelautan dan perikanan secara berkesinambungan
3. Meningkatkan kapasitas usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

Rancangan Tujuan :

1. Meningkatkan serapan produk kelautan dan perikanan di pasar dalam negeri dan market share produk kelautan dan perikanan di pasar luar negeri.
2. Meningkatkan produktivitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan serta logistik dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan
3. Meningkatkan kapasitas usaha subsektor pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.
4. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien, profesional, dan berorientasi hasil dalam mendukung penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan

Sasaran Strategis :

1. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional
2. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

Program :

1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
2. Dukungan Manajemen

Sasaran Program :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing
2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2025-2029. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025

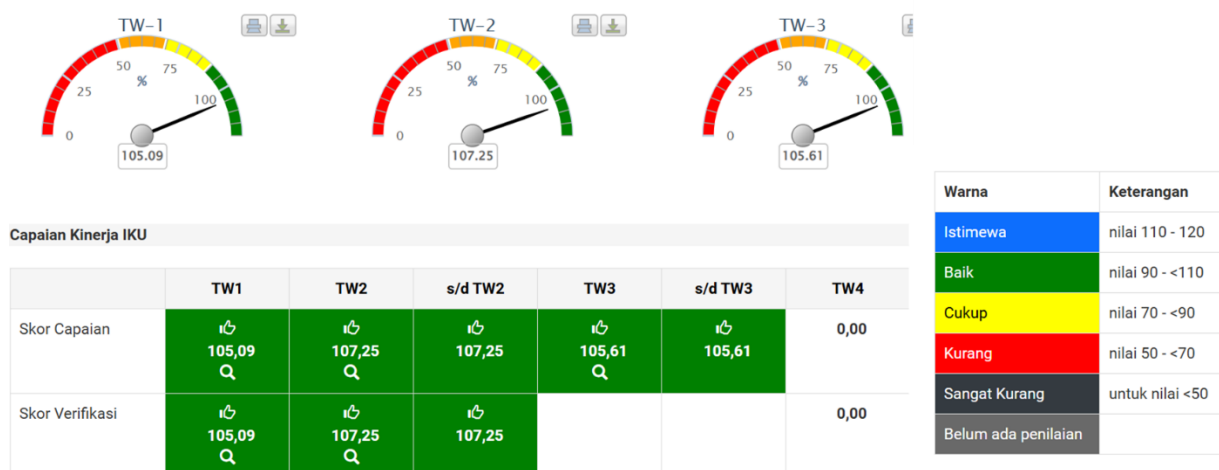
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,7
		2.	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (Persen)	100
		3.	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (Persen)	100
2.	Meningkatnya Produksi Olahan	4.	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton)	3,71

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2025
	Kelautan dan Perikanan	5.	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	80
		6.	Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen)	100
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	81
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	81

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan

Direktorat Pengolahan memiliki 11 indikator kinerja yang terdiri dari 3 indikator kinerja bersifat tahunan, 3 indikator kinerja bersifat semesteran, 5 indikator kinerja bersifat triwulanan. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dari Juli sampai dengan September 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerjaku pada triwulan III sebesar 105,61. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 adanya penurunan 1,64 poin atau -1,53%, dan jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar 0,52 poin atau 0,49%.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW III Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target		Realisasi		% Terhadap Target	
				Tahun 2025	TW III	Tahun 2025	TW III	Tahun 2025	TW III
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,7	-	-	-	-	-
		2.	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (Persen)	100	75	-	75	75,00%	100,00%
		3.	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibangun Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (Persen)	100	23	-	28,31	28,31%	120,00%
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	4.	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton)	3,71	-	-	-	-	-
		5.	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	80	-	-	-	-	-
		6.	Persentase Pelaku Usaha yang dibangun Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen)	100	33	-	33,52	33,00%	101,58%

3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95	95	-	100	105,26%	105,26%
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100	-	-	-	-	-
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	81	-	-	-	-	-
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86	-	-	-	-	-
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	81	-	-	-	-	-

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Realisasi produksi dibandingkan dengan kapasitas produksi terpasang pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah dan Besar. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan

ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumutan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	-	68,70	-	68,70	-	74,27	68,12	-	108,11	108,11	-	-

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa indikator kinerja Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan bersifat semesteran sehingga pada triwulan III 2025 belum terdapat capaian dan baru akan terlihat di triwulan IV 2025. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran IK Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan merupakan gabungan dari tiga kegiatan, yaitu Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Skala Menengah dan Besar, Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Dibina, Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil, dan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan. Indikator kinerja Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu sebesar Rp 387.537.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp 254.631.176,- atau sebesar 65,70% dari pagu anggaran pasca blokir.

Faktor Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III adalah masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan

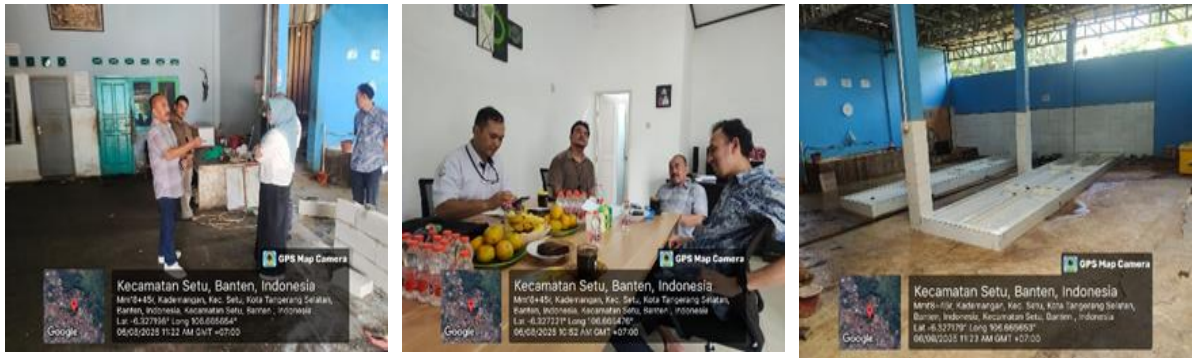
kelayakan dasar penanganan dan pengolahan serta sertifikasi produk perikanan. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III adalah capaian output pembinaan terhadap UPI skala mikro dan kecil dapat dilaksanakan sesuai target. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya, yaitu pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kelayakan dasar penanganan dan pengolahan serta sertifikasi produk perikanan perlu terus ditumbuhkan dan difasilitasi melalui edukasi (penyebarluasan informasi melalui media sosial, kegiatan klinik mutu di bazar atau sosialisasi) dan pembinaan langsung kepada pelaku usaha perikanan, untuk memastikan produk tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga dipercaya konsumen dan mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan pada triwulan sebelumnya, telah dilaksanakannya edukasi dan pembinaan dalam kegiatan webinar dan pelaksanaan kunjungan lapang ke UPI dan UMKM. Serta dilakukannya kolaborasi antara Direktorat Pengolahan dan PT. Alderon dalam pengolahan ramah lingkungan, PT. Alderon memperkenalkan *Solar Dryer Dome* (SDD) dalam kegiatan Pembinaan Penanganan dan Pengolahan Ikan Asin Skala Mikro dan Kecil pada UPI Skala Mikro dan Kecil di Kalibaru, Jakarta Utara.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Pembinaan PT. Hidayat Bahari Sejahtera (HBS)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli dan dilanjutkan pada tanggal 3 September 2025, di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan dihadiri oleh tim dari Direktorat Pengolahan, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pembinaan teknis untuk menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) serta bantuan menuju sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). PT. HBS memproduksi pindang dan memiliki fasilitas yang cukup, tetapi belum sepenuhnya menerapkan GMP dan SSOP. Mereka sudah memiliki legalitas usaha dan melakukan inovasi. Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan mencapai 60%. Kegiatan ini meningkatkan standar mutu dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan BPOM.



Gambar 5. Pembinaan PT. Hidayat Bahari Sejahtera (HBS)

2. Pembinaan dan Monitoring UPI Skala Mikro dan Kecil di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada tanggal 18–20 Juli 2025 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan dihadiri oleh pelaku usaha UPI penerima bantuan DAK Bedah UPI Tahun 2024. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan bantuan pemerintah serta meninjau kondisi sentra pengolahan ikan. Kegiatan meliputi kunjungan ke UD. Alang-Alang Tumbuh Subur dan pendampingan kepada Poklaksar Karmina. Tindak lanjut termasuk penyusunan dokumen HACCP dan rekomendasi pemanfaatan aset. Kegiatan ini berdampak positif pada legalitas dan standar mutu UPI.



Gambar 6. Pembinaan dan Monitoring UPI Skala Mikro dan Kecil di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

3. Pembinaan UMKM dan Identifikasi Potensi Perikanan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada tanggal 28-31 Juli 2025 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kegiatan dihadiri oleh Dinas Perikanan, pelaku usaha, dan perwakilan pemerintah daerah. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mengidentifikasi potensi perikanan dan membina pelaku UMKM untuk meningkatkan mutu, legalitas, dan akses pasar. Kabupaten Asahan memiliki potensi perikanan besar, terutama udang rebon dan terasi, namun ada kendala legalitas dan SDM. Rencana tindak lanjut termasuk pendampingan dan pengembangan industri terasi. Kegiatan ini mendorong kolaborasi pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk perikanan lokal.



Gambar 7. Pembinaan UMKM dan Identifikasi Potensi Perikanan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

4. Pembinaan Penanganan dan Pengolahan Ikan Asin Skala Mikro dan Kecil di Kalibaru – Jakarta Utara

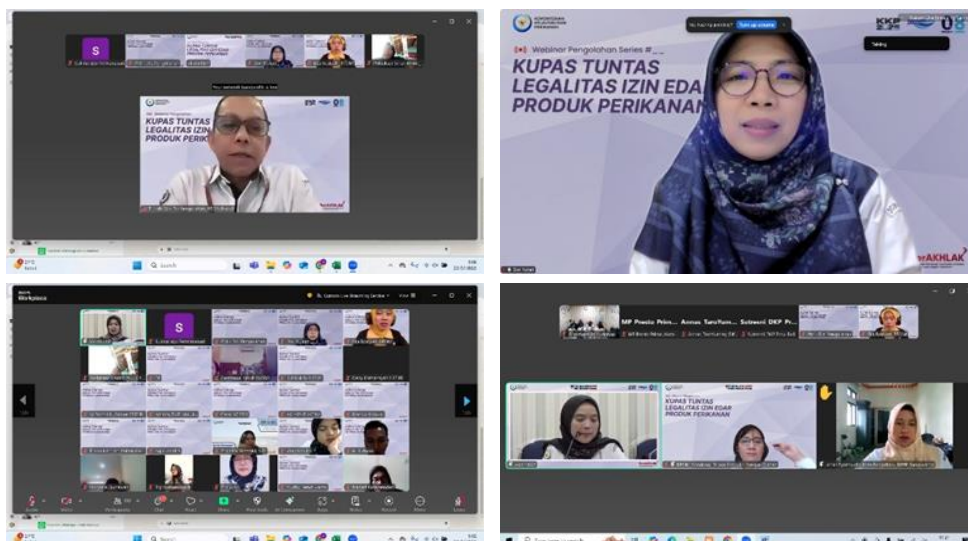
Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025, di Kalibaru, Jakarta Utara. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan PT. Alderon, Dinas KPKP DKI Jakarta, dan Poklhasr Bersama Maju. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah menerapkan GMP dan SSOP serta memperkenalkan *Solar Dryer Dome* (SDD). Kapasitas produksi Poklhasr Bersama Maju yaitu 500 kg/hari. Pada saat pelaksanaan pembinaan dilakukan uji coba pengeringan dengan SDD, proses pengeringan dengan SDD menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan kadar air dan meningkatkan kualitas ikan. Program ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pengolahan ramah lingkungan.



Gambar 8. Pembinaan Penanganan dan Pengolahan Ikan Asin Skala Mikro dan Kecil di Kalibaru – Jakarta Utara

5. Webinar Kupas Tuntas Legalitas Izin Edar Produk Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 secara daring. Kegiatan diikuti oleh 1.092 peserta dari berbagai kalangan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengedukasi UMKM mengenai pentingnya izin edar untuk daya saing produk serta memberikan panduan tentang proses pengurusannya. Narasumber dari BPOM membahas tata cara pengajuan izin dan persyaratan izin edar. Kegiatan ini meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang legalitas dan mendorong UMKM untuk menggunakan layanan publik terpadu untuk mempercepat izin edar.



Gambar 9. Webinar Kupas Tuntas Legalitas Izin Edar Produk Perikanan

6. Webinar Kupas Tuntas Masa Simpan Produk Perikanan

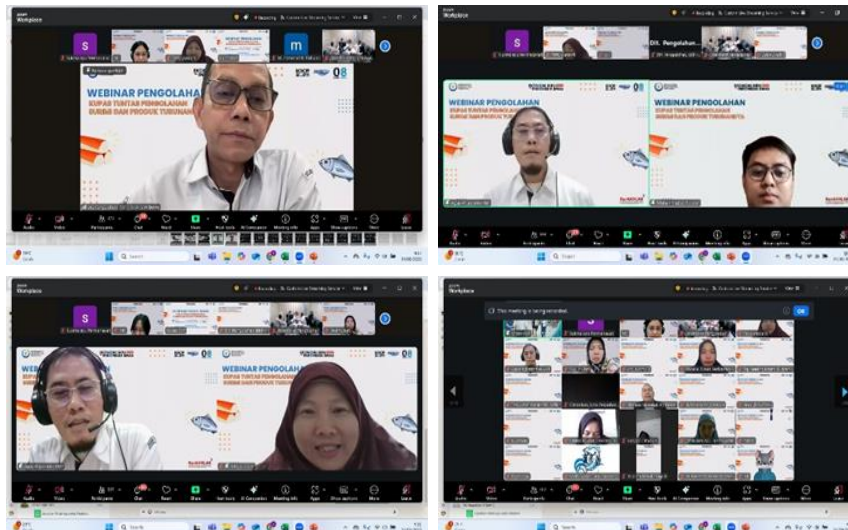
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 secara daring. Kegiatan diikuti oleh 1.117 peserta dari berbagai latar belakang. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyosialisasikan pedoman resmi masa simpan produk perikanan, meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut, dan menyampaikan metode praktis bagi UMK. Narasumber membahas pedoman dan penentuan masa simpan, serta menjawab pertanyaan peserta. Kesimpulannya, webinar ini meningkatkan pemahaman UMK dalam penetapan masa simpan untuk menjaga mutu dan keamanan produk.



Gambar 10. Webinar Kupas Tuntas Masa Simpan Produk Perikanan

7. Webinar Kupas Tuntas Pengolahan Surimi dan Produk Turunannya

Kegiatan dilaksanakan pada 25 September 2025 secara daring. Kegiatan diikuti oleh 759 peserta dari berbagai latar belakang. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman tentang teknologi pengolahan surimi, memberikan rekomendasi praktis untuk UMKM, dan membangun jejaring. Pembahasannya mencakup teknik pengolahan surimi dan prospek usaha, juga termasuk pertanyaan peserta mengenai jenis ikan dan proses pembuatan. Kegiatan ini menambah wawasan dan peluang bagi UMKM.



Gambar 11. Webinar Kupas Tuntas Pengolahan Surimi dan Produk Turunannya

8. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Klinik Mutu

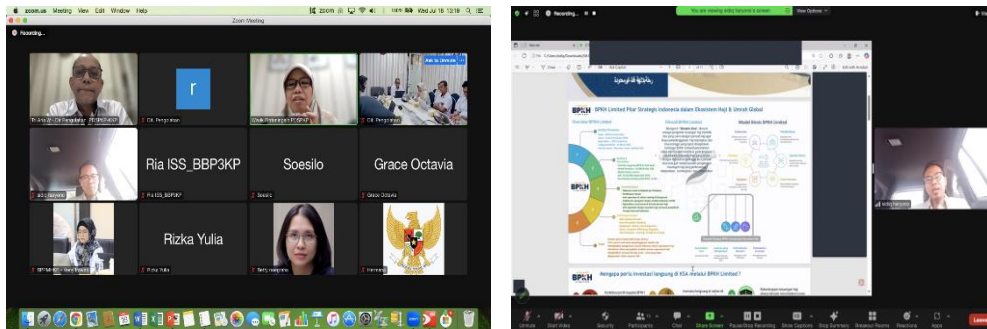
Kegiatan Klinik Mutu dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2025 dari Juli hingga September, baik secara daring melalui media sosial @klinikmutukp maupun langsung di Bazar Produk Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Peserta kegiatan ini mencakup tim Direktorat Pengolahan, pelaku UMKM, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan di bidang jaminan mutu hasil kelautan. Tujuan Klinik Mutu adalah memberikan konsultasi dan edukasi tentang jaminan mutu perikanan, legalitas usaha, dan keamanan pangan. Klinik Mutu telah mempublikasikan 13 materi edukatif dan menyediakan layanan konsultasi interaktif. Selain itu, adanya pemantauan mutu di Bazar menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha masih menghadapi masalah seperti izin edar yang belum ada. Klinik Mutu memberikan arahan untuk perbaikan tersebut. Kegiatan ini berkontribusi pada kesadaran pentingnya jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan.



Gambar 12. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Klinik Mutu

9. Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Kinerja UPI Pengolahan Patin

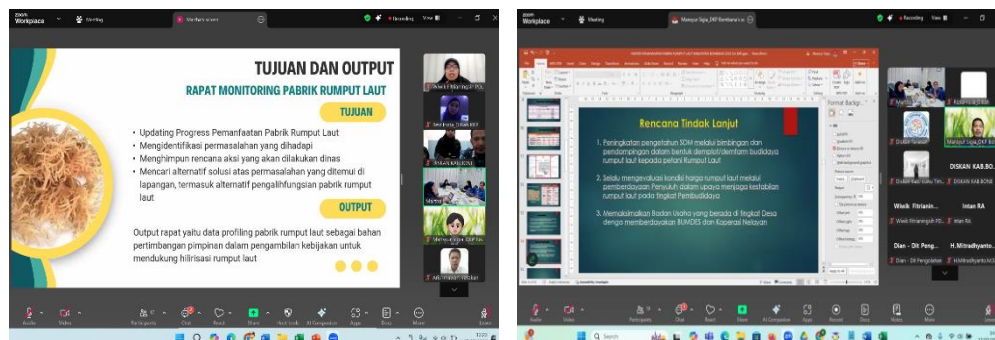
Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025, secara *hybrid* dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan volume produksi olahan patin dengan mengakses pasar di Arab Saudi. Saat ini, terdapat 22 UPI Pengolahan Patin di 7 provinsi dengan kapasitas produksi sekitar 35.000 ton per tahun. Namun, pada tahun 2023, hanya sekitar 5.300 ton yang diproduksi, yang menunjukkan pemanfaatan kapasitas hanya sekitar 15%. Data menunjukkan bahwa produksi patin stabil, tetapi permintaan pasar yang rendah adalah masalah utama. Arab Saudi tidak menjadi pasar utama bagi produk patin, tetapi ada peluang untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umroh yang belum dioptimalkan. Kebutuhan ikan selama musim haji diperkirakan mencapai 240 ton untuk jemaah haji Indonesia. Preferensi pasar di Arab Saudi adalah produk patin yang tidak berbau lumpur dan dalam bentuk siap masak. Kendala utama adalah kurangnya nomor registrasi dari *Saudi Food and Drugs Administration* (SFDA). Namun, produk patin Indonesia masih bisa diekspor jika ditujukan khusus untuk jemaah haji dengan sertifikat kesehatan dari BPOM. Asosiasi Pengusaha *Coldstorage* Indonesia (APCI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited akan berkoordinasi tentang spesifikasi produk patin untuk jemaah haji dan umroh. Direktorat terkait akan membantu meningkatkan kinerja UPI dan menyiapkan produk untuk ekspor ke Arab Saudi.



Gambar 13. Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Kinerja UPI Pengolahan Patin

10. Monev Pemanfaatan Pabrik Rumput Laut

Rapat dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juli 2025 secara *hybrid* di Ruang Rapat Pembinaan dan online melalui Zoom. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen PDSPKP, Inspektorat Bidang IV KKP, dan Dinas Kelautan dan Perikanan dari berbagai daerah penerima bantuan, seperti Kabupaten Bone, Luwu Timur, dan lainnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memantau kondisi pabrik rumput laut yang dibangun oleh KKP pada tahun 2016-2017. Dari 6 pabrik yang dilaporkan, hanya 1 pabrik di Luwu Timur yang beroperasi. Dua pabrik di Bombana dan Buton dalam proses penajakan kerjasama. Monitoring mandiri akan dilakukan untuk daerah yang tidak hadir. Direktorat Pemberdayaan Usaha diharapkan dapat membantu penajakan kerjasama dengan calon investor, dan pengalihan fungsi pabrik harus sesuai dengan peraturan daerah setempat.

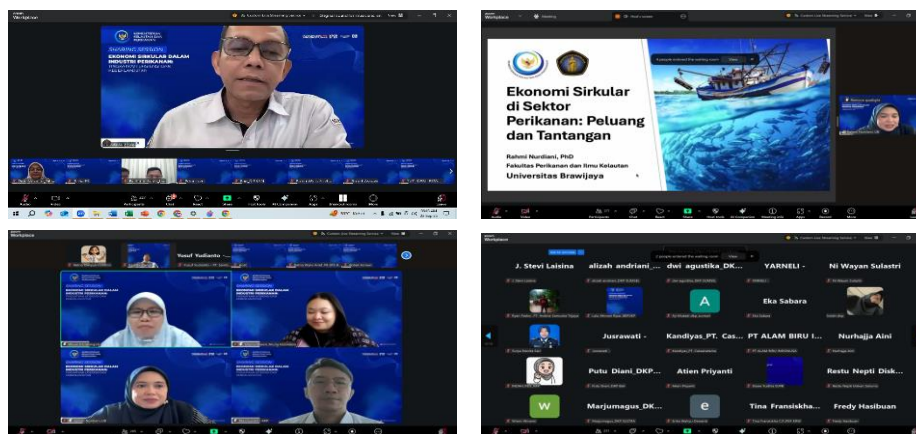


Gambar 14. Monev Pemanfaatan Pabrik Rumput Laut

11. Sharing Session Ekonomi Sirkular dalam Industri Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada 23 September 2025, secara online dan diikuti oleh 303 peserta melalui *Zoom Meeting* dan 1.100 melalui *live streaming* di YouTube. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pengolahan dan melibatkan pemerintah, asosiasi, akademisi, dan pelaku usaha, terutama UPI skala menengah dan

besar. Tujuan dari sesi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang ekonomi sirkular dan tantangannya dalam industri pengolahan perikanan, serta memberikan contoh praktik terbaik baik nasional maupun internasional. Dalam sambutannya, Direktur Pengolahan menjelaskan pentingnya kebijakan ekonomi biru yang sejalan dengan ekonomi sirkular. Para narasumber memberikan materi terkait penerapan ekonomi sirkular, termasuk Rahmi Nurdiani yang membahas pengurangan *Food Loss and Waste* (FLW), Mardiyanto yang menjelaskan pentingnya pendataan UPI, dan Sheilla Sheen yang berbagi pengalaman tentang ekosistem Aruna Hub. Peserta juga memberikan masukan terkait penerapan ekonomi sirkular, termasuk perwakilan Bappenas yang membahas kebijakan roadmap. Kesimpulan dari sesi ini adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan swasta untuk penerapan ekonomi sirkular. Edukasi masyarakat dan dukungan untuk UMKM pengolahan hasil samping diperlukan agar limbah UPI dapat dimanfaatkan dengan baik. Pelatihan untuk mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah serta branding dan akses pasar juga menjadi aspek penting untuk mendukung UMKM dalam industri perikanan.



Gambar 15. Sharing Session Ekonomi Sirkular dalam Industri Perikanan

IK 2. Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI

Presentase rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan yang memenuhi tahapan perumusan SNI adalah capaian perumusan SNI dibandingkan dengan keseluruhan tahapan perumusan SNI pada tahun berjalan. Tahapan perumusan Rancangan SNI produk perikanan meliputi RSNi1, RSNi2, RSNi3,

penyampaian RSNI ke BSN. Perumusan rancangan SNI dilakukan oleh Komite teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Perubahan dalam perdagangan internasional telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, dengan tujuan : 1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; 2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat; 3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (e-balloting) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di website SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI	75	50	-	100	75	50	-	75	100	75	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan III 2025 capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI adalah sebesar 75%. Capaian tersebut setara dengan 100% terhadap target Triwulan III 2025 yakni 75% atau setara dengan

150,00% jika dibandingkan dengan target Triwulan II 2025 yakni 50%. IK tersebut adalah bersifat Triwulanan. IK tersebut pada periode yang sama di tahun 2024 bernama Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan dengan satuan produk. Terdapat perbedaan satuan antara Triwulan III 2025 dengan periode yang sama di tahun 2024, sehingga capaian tersebut tidak dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI sebesar Rp 102.655.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp 87.875.557,- atau sebesar 85,60% dari pagu anggaran pasca blokir.

Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pada kegiatan Triwulan III 2025 adalah terdapat usulan dari Direktorat Sumberdaya Kelautan, Ditjen Pengelolaan Kelautan, terkait Cara Produksi Garam yang Baik agar dapat menjadi Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III adalah terdapat 4 (empat) RSNI3 Lingkup Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan yang telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025 tanpa tanggapan substantif selama jajak pendapat. Status RSNI3 tersebut meningkat menjadi RSNI4 yang kemudian akan divalidasi menjadi RASNI dan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi SNI. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan RSNI3 yang dilaksanakan pada bulan Oktober dan penetapan SNI di bulan Desember 2025.

Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan pada triwulan sebelumnya, dikarenakan penyusunan RSNI tahun berjalan sudah berlangsung sehingga rekomendasi pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan pada tahun depan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Bimbingan Teknis Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan dilaksanakan secara daring pada 17 Juli 2025. Peserta kegiatan ini mencakup Dinas Kelautan dan Perikanan dari berbagai daerah, perwakilan Ditjen PDSPKP, dan Tim Ahli Indikasi Geografis. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kriteria indikasi geografis, termasuk karakteristik, reputasi, kualitas, batas wilayah, proses produksinya, dan faktor lingkungan. Selain

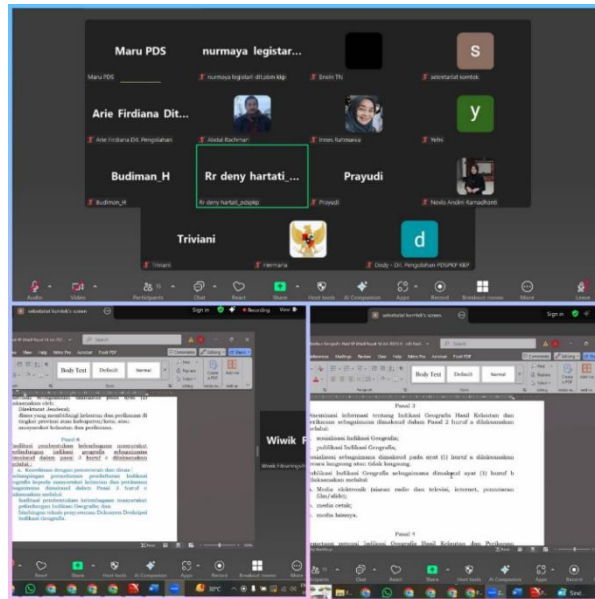
itu, juga bertujuan untuk meningkatkan identifikasi hasil kelautan dan perikanan yang potensial untuk didaftarkan indikasi geografis. Materi yang dibahas meliputi definisi dan manfaat indikasi geografis, dasar hukum, tahapan identifikasi, serta dokumen deskripsi yang menjelaskan karakteristik dan pengaruh faktor geografis. Kesimpulan dari kegiatan ini mencakup pembentukan tim pembinaan indikasi geografis, inventarisasi data hasil kelautan dan perikanan yang potensial untuk pendaftaran, pelaksanaan FGD untuk lokasi tertentu yang telah mengirimkan data, serta penyempurnaan peraturan tentang pelaksanaan indikasi geografis.



Gambar 16. Bimbingan Teknis Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

2. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pelaksanaan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

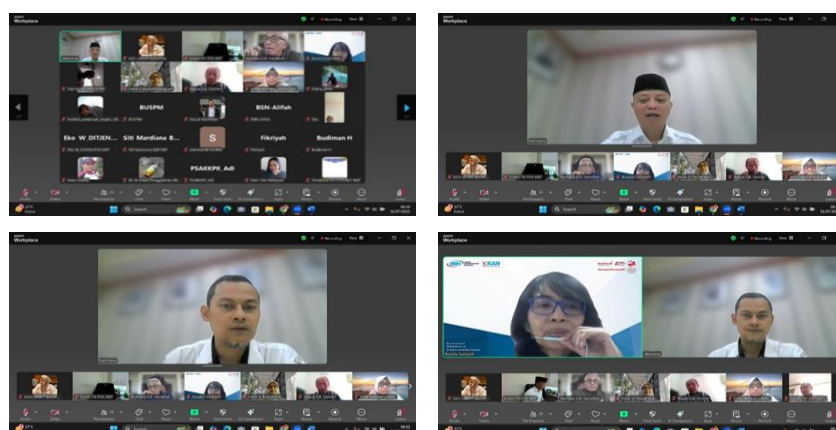
Rapat dilaksanakan secara daring pada 18 Juli 2025. Rapat dihadiri oleh Bapak Abdul Rokhman dan tim dari Ditjen PDSPKP. Tujuan rapat adalah untuk membahas revisi draft peraturan. Beberapa perubahan penting meliputi penggantian istilah "pengembangan" menjadi "pelaksanaan," penambahan pendaftaran internasional sebagai bagian pemanfaatan, dan penghapusan Bab II. Pasal 5 dan 6 membahas inventarisasi produk dan kelembagaan masyarakat. Penelitian terkait faktor geografis menjadi bagian dari pemetaan. Pendaftaran dilakukan secara online dengan pendampingan literasi digital. Kesimpulan rapat adalah penyempurnaan draft dan penyusunan SK Tim Pembinaan. Rapat tindak lanjut dijadwalkan pada 21 Juli 2025 untuk finalisasi dan pengiriman draft ke tim kerja hukum.



Gambar 17. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pelaksanaan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

3. Rapat Kaji Ulang SNI Produk Perikanan

Kegiatan dilaksanakan secara online pada 31 Juli 2025, dihadiri oleh anggota Komtek, Konseptor, Sekretariat komtek, serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal – BSN. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memelihara standar sesuai dengan Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia. Rapat menghasilkan 8 rekomendasi SNI untuk revisi terkait produk perikanan, seperti SNI 4110:2020 Ikan Beku dan SNI 8606:2020 Filet Patin beku, serta 11 rekomendasi SNI untuk penetapan kembali, termasuk SNI 2354-22:2020 Cara uji kimia dan SNI 2332-13:2020 Cara uji mikrobiologi. Kesimpulan dari rapat adalah pengajuan 8 SNI rekomendasi revisi dan 11 SNI rekomendasi tetap untuk penetapan kembali.



Gambar 18. Rapat Kaji Ulang SNI Produk Perikanan

4. Pemantauan Penerapan dan Kaji Ulang SNI di Kab. Bekasi

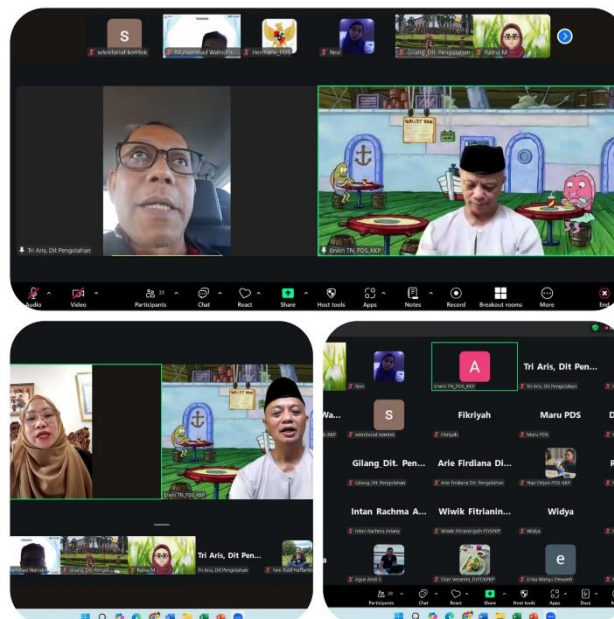
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2025 dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pengolahan. Tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, dan identifikasi penerapan SNI. Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Bandeng Turangga, produk yang diolah dari ikan Bandeng antara lain Otak-otak Bandeng, Amplang Bandeng, Tahu Bakso Bandeng, dan Bandeng isi. UKM ini memiliki berbagai izin legal, tetapi merek belum terdaftar di Kemenkum. Mereka belum siap menerapkan SNI karena pemilik merasa syarat yang ada terlalu rumit, meskipun ada keinginan untuk menerapkannya di masa depan. Dapur Sauja adalah UKM yang mengolah pempek dan tekwan. Mereka sudah memiliki berbagai sertifikasi termasuk SNI, serta menggunakan sistem pembayaran digital dan laporan keuangan yang terpisah. Dapur Sauja menerapkan manajemen kualitas yang baik dan memasarkan produk melalui e-commerce serta media sosial, juga bekerja sama dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Kesimpulan dari evaluasi adalah bahwa Dapur Sauja telah tersertifikasi SNI untuk produk Pempek pada tahun 2023, tetapi volume produksi tidak meningkat signifikan karena konsumen belum memahami SNI. Diharapkan proses pengujian dapat dibuat lebih mudah.



Gambar 19. Pemantauan Penerapan dan Kaji Ulang SNI di Kab. Bekasi

5. Koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UPI Skala Mikro Kecil Produk Perikanan

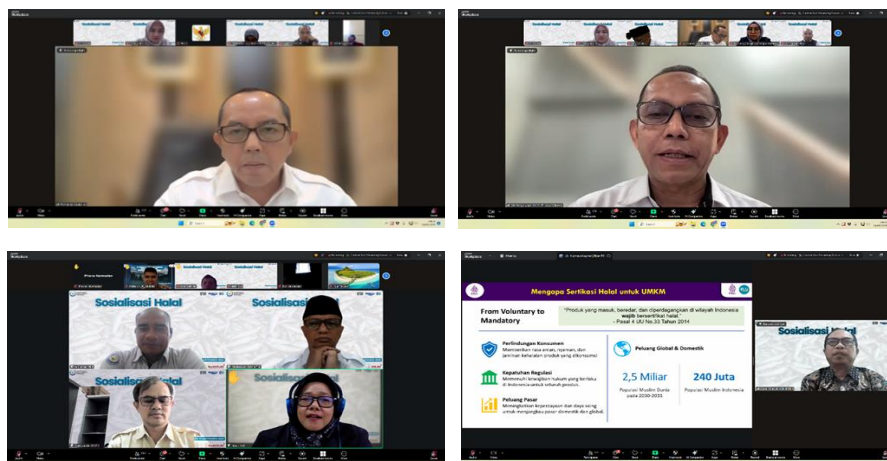
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025, rapat dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Lembaga terkait. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyelaraskan program dan kebijakan agar pelaku usaha pengolahan ikan mikro kecil lebih mudah mendapatkan sertifikat halal, yang saat ini hanya sebagian kecil dari 76.318 UPI yang ada. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjelaskan bahwa Sertifikat Halal penting untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai produk halal. Usulan dari rapat mencakup Pembina Mutu sebagai pendamping halal untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pelatihan mengenai kebijakan halal, pendaftaran pendamping halal, dan integrasi data UMKM. Penting untuk membuat draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PDSPKP dan BPJPH serta mengidentifikasi sumber anggaran untuk kegiatan pendampingan. Kesimpulannya, perlu ada koordinasi lanjutan dan penyusunan draf PKS.



Gambar 20. Koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UPI Skala Mikro Kecil Produk Perikanan

6. Webinar Sosialisasi Halal dengan tema Optimalisasi Pendampingan dalam mendukung Kebijakan Sertifikasi Halal

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025 secara *hybrid*, dihadiri oleh 645 peserta dari berbagai lembaga terkait di seluruh Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang pendampingan sertifikasi halal untuk produk kelautan dan perikanan, khususnya untuk UMKM unit pengolahan ikan. Webinar ini merupakan kolaborasi antara Ditjen PDSPKP dan BPJPH untuk mempercepat sertifikasi halal. Pembicara utama adalah Dirjen PDSPKP, Tornanda Syaifullah, yang menyatakan fokus pendampingan adalah pada skema *self declare* untuk UMKM. KKP berencana mendampingi UMKM dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal dan membentuk tim satgas untuk mempercepat proses tersebut. Materi disampaikan oleh pejabat dari BPJPH, menjelaskan bahwa sertifikasi halal adalah kewajiban bagi semua produk di Indonesia. Kewajiban ini harus diterapkan secara bertahap hingga 17 Oktober 2026. Kesimpulannya, akan ada koordinasi lebih intensif antara Ditjen PDSPKP dan BPJPH untuk mempercepat pendampingan sertifikasi halal bagi produk kelautan dan perikanan.

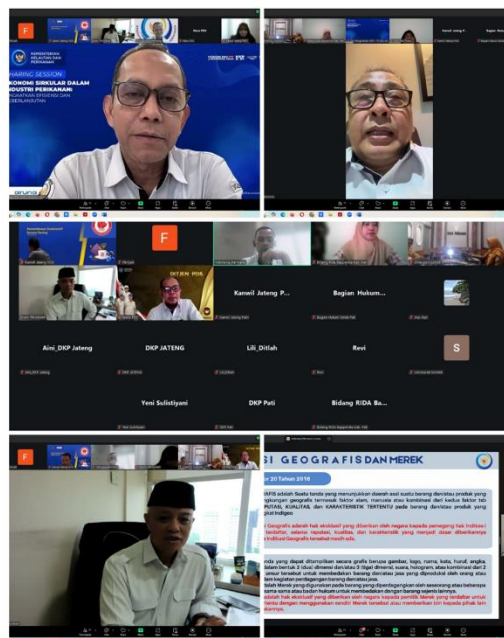


Gambar 21. Webinar Sosialisasi Halal dengan tema Optimalisasi Pendampingan dalam mendukung Kebijakan Sertifikasi Halal

7. Melakukan Pembahasan potensi indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan di wilayah Jawa Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 secara daring. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta Dinas

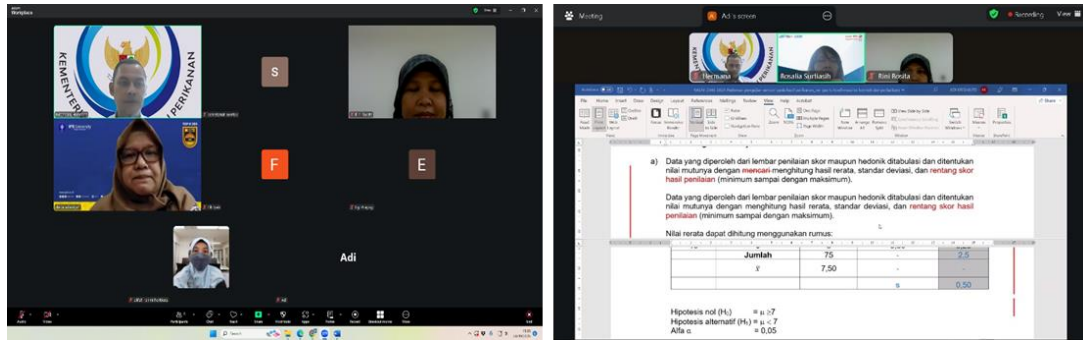
Perikanan dari beberapa kabupaten. Tujuan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi potensi indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan di provinsi tersebut. Diskusi mencakup sidat bicolor dari Kabupaten Cilacap, yang dinyatakan memiliki data lengkap dan diusulkan pembentukan kelompok untuk menyusun dokumen deskripsi. Dukungan dari pemerintah provinsi dan kanwil disampaikan untuk tindak lanjut. Sedangkan untuk bandeng Pati, terdapat kendala dalam pendaftaran indikasi geografis karena adanya merek dagang yang sudah terdaftar. Tim ahli menyarankan koordinasi dengan DKP Semarang dan merekomendasikan produk lain seperti terasi pati. Kesimpulan dari rapat menegaskan perlunya semangat bersama dalam mendorong indikasi geografis, di mana beberapa produk masih perlu didaftarkan, termasuk ikan beong dari Magelang dan sidat bicolor dari Cilacap.



Gambar 22. Melakukan Pembahasan potensi indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan di wilayah Jawa Tengah

8. Rapat Konfirmasi Dokumen RSNi Pedoman Pengujian Sensori pada Hasil Perikanan

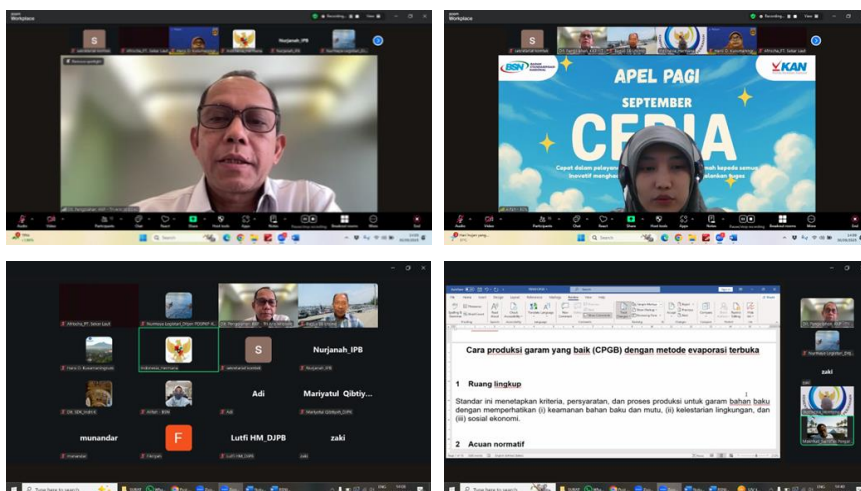
Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 secara daring, dihadiri oleh perwakilan dari BSN dan konseptor dari berbagai institusi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memverifikasi draf akhir RSNi Pedoman pengujian sensori sebelum penetapan. Dalam rapat, dibahas perbaikan redaksional dan akan ada pengiriman draf kembali pada 26 September 2025.



Gambar 23. Rapat Konfirmasi Dokumen RSNi Pedoman Pengujian Sensori pada Hasil Perikanan

9. Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Cara Produksi Garam yang Baik (CPGB) dengan Metode Evaporasi Terbuka

Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 secara *hybrid*, baik langsung maupun melalui Zoom Meeting. Peserta rapat termasuk Direktur Sumber Daya Kelautan, anggota Komtek 65-05, dan perwakilan dari BSN. Tujuannya adalah membahas RSNi1. Pembahasan meliputi istilah, sistematika, sarana produksi, higiene pekerja, kompetensi, dan diagram alir. Kesimpulannya, RSNi0 disetujui menjadi RSNi1 dan konseptor akan memperbaiki konsep sesuai masukan untuk rapat RSNi2.



Gambar 24. Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Cara Produksi Garam yang Baik (CPGB) dengan Metode Evaporasi Terbuka

IK 3. Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP

Pembinaan Unit Pengolahan Produk KP menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP dilakukan melalui sosialisasi, bimtek, dan atau pembinaan lapangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dan/atau manual HACCP dan/atau laporan pembinaan.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP	23	10	-	100	28,31	14,83	-	28,31	123	28,31	-	-

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja (IK) Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP pada Triwulan III 2025 adalah sebesar 28,31% atau setara 123,00% dengan target Triwulan III 2025 yakni 23%, dan setara dengan 28,31% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 100%, jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II 2025 maka setara dengan 283%. IK tersebut adalah bersifat triwulanan. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan

Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP sebesar Rp 44.666.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp 43.368.394,- atau sebesar 97,09% dari pagu anggaran pasca blokir.

Pada Triwulan III 2025 tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan III, adalah memberikan peningkatan pemahaman dan kompetensi teknis kepada Pembina Mutu lingkup Direktorat Pengolahan terkait layanan audit mutu bagi UPI, dan memberikan peningkatan kompetensi teknis Pembina Mutu HACCP dalam berkontribusi menjaga jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya, yaitu perlu dilakukan implementasi ke lapangan oleh Pembina Mutu yang telah melaksanakan Audit Internal untuk menambah jam terbang dan membantu dan memfasilitasi UMKM yang akan menuju HACCP, dan perlu dilakukan pelatihan HACCP baik untuk yang belum pernah maupun yang sudah pernah untuk di *refreshment* ulang terhadap perkembangan CXC dan regulasi terbaru secara bertahap

Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan pada triwulan sebelumnya, telah diterbitkannya SK Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pembina Mutu Terdaftar, diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2025. Dan telah dilaksanakannya Training Pembina Mutu *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) yg dilaksanakan secara *hybrid* pada 30 dan 31 Juli 2025. Peserta pelatihan terdiri dari 25 calon Pembina Mutu HACCP, 136 Pembina Mutu Daerah, serta perwakilan dari UNIDO dan GQSP Indonesia.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Training Audit Internal *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP)

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2025 secara *hybrid*. Kegiatan diikuti oleh 34 peserta dari Pembina Mutu Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Tujuan pelaksanaan pelatihan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis peserta tentang layanan audit mutu. Pelatihan dibuka oleh Kepala Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan, dihadiri oleh perwakilan *United nations Industrial Development Organization* (UNIDO) dan *Global Quality and Standards Programme* (GQSP) Indonesia, serta Direktur Pengolahan. Peserta diharapkan mengikuti pelatihan secara serius agar dapat menjadi Pembina Mutu yang kompeten. Materi mencakup pemahaman tentang SNI ISO 19011:2018 dan praktik audit virtual. Pada hari kedua, peserta

mempresentasikan dokumen manual HACCP yang didiskusikan secara interaktif, sementara narasumber membahas proses pembinaan HACCP dan langkah-langkah audit. Kegiatan ditutup oleh Kepala Tim Kerja, dengan harapan pelatihan ini mendukung sistem pembinaan mutu di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Kesimpulannya, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta. Diharapkan ke depan, Pembina Mutu yang telah melaksanakan audit internal dapat menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk membantu UMKM menuju HACCP.



Gambar 25. Training Audit Internal Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

2. Training Pembina Mutu *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara *hybrid* pada 30 dan 31 Juli 2025. Peserta pelatihan terdiri dari 25 calon Pembina Mutu HACCP, 136 Pembina Mutu Daerah, serta perwakilan dari UNIDO dan GQSP Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung visi Presiden dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada hari pertama, pelatihan dibuka oleh Direktur Jenderal PDSPKP, menekankan pentingnya inovasi dalam proses pengolahan produk perikanan yang memenuhi standar. Selain itu, dibahas bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan HACCP sebelumnya dengan harapan adanya pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Narasumber dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan UNIDO memberikan materi mengenai prosedur sertifikasi dan penerapan HACCP. Pada hari kedua, kelompok peserta menyusun reviu manual HACCP yang akan dinilai oleh Tim Reviu. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurang lengkapnya deskripsi bahan, ketidaksesuaian alur proses, serta tidak konsistennya analisa bahaya. Sesi pelatihan diakhiri dengan pengukuran keberhasilan yang menunjukkan peningkatan signifikan. Pelatihan ditutup dengan pesan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan menyiapkan perbaikan manual

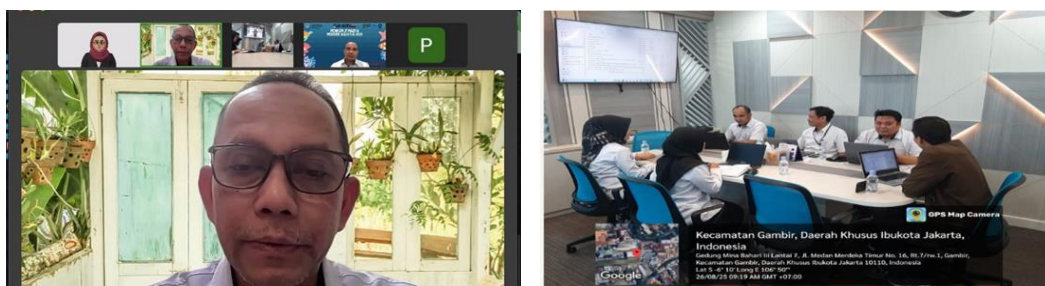
HACCP sebelum 8 Agustus 2025. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan kegiatan ini berhasil meningkatkan kompetensi teknis peserta. Rekomendasi ke depan adalah perlunya pelatihan ulang untuk semua peserta agar tetap up-to-date dengan regulasi terbaru.



Gambar 26. Training Pembina Mutu *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)

3. Pelaksanaan Verifikasi *Quality Management System* (QMS)

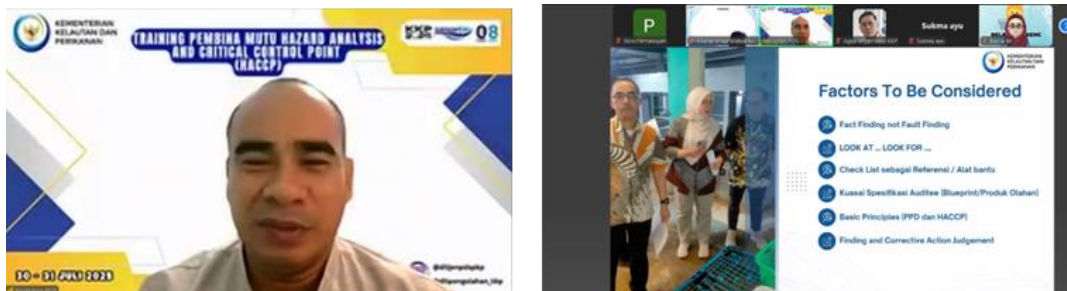
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 di Ruang Rapat Direktorat Pengolahan. Kegiatan ini dihadiri oleh empat (4) anggota Tim Pusat Manajemen Mutu sebagai tim verifikator. Tujuan verifikasi adalah untuk menilai penerapan QMS dalam pembinaan oleh Direktorat Pengolahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hasil verifikasi menunjukkan nilai 91,67, dengan pembinaan SKP dan HACCP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unit kerja sedang menyesuaikan mekanisme pembinaan berdasarkan PP 28/2025. Kualifikasi pembina mutu yang ada hanya untuk pembina mutu HACCP, sedangkan untuk SKP masih terbatas. Evaluasi terhadap kompetensi Pembina Mutu perlu dilakukan. Tidak ada kendala dalam verifikasi, dan pembinaan yang dilakukan sesuai peraturan. Rekomendasi kedepannya adalah monitoring proses pembinaan dan sosialisasi regulasi terbaru oleh Ditjen PDSPKP dan sertifikasi oleh BPPMHKP.



Gambar 27. Pelaksanaan Verifikasi *Quality Management System* (QMS)

4. *Sharing Session* Kegiatan Sebagai Observer Inspeksi UPI

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025 melalui zoom dan dihadiri oleh Pembina Mutu dari Direktorat Pengolahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengamati proses inspeksi di Unit Pengolahan Ikan (UPI). Dalam sesi ini, Pembina Mutu berbagi pengalaman sebagai observer selama inspeksi yang dilakukan oleh inspektur mutu. Inspektur melakukan persiapan sebelum inspeksi dengan membaca dokumen dan menyiapkan checklist. Selama pelaksanaan, inspektur memeriksa dokumentasi dan proses, memastikan tidak ada ketidaksesuaian dengan dokumen yang ada. Inspektur juga menguasai regulasi terkait produk. Pada akhir inspeksi, inspektur mengungkapkan temuan dan memberikan kesempatan kepada UPI untuk mengklarifikasi hasil tersebut. UPI dapat memperbaiki temuan dalam waktu sebulan sebelum pengajuan sertifikat HACCP. Pembina Mutu diharapkan memahami regulasi dan teknik inspeksi lebih baik lagi di masa depan, dan dapat dilibatkan dalam proses audit untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini, dan pembina mendapat pengetahuan berharga.



Gambar 28. *Sharing Session* Kegiatan Sebagai Observer Inspeksi UPI

Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

IK 4. Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

Produksi Olahan KP adalah volume produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan skala mikro, kecil (MK) dan skala menengah besar (MB).

Penghitungan VPO skala Menengah Besar dilakukan melalui penarikan data volume dan jenis produk UPI Skala Menengah Besar (UPIMB) yang tercatat dalam data BP2MHKP dan Badan Karantina Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi data ekspor dan domestik keluar. Data lalu lintas ikan digunakan sebagai pendekatan dalam

penghitungan VPO UPI MB, karena menyediakan data volume dan jenis produk olahan yang diproduksi oleh UPI MB.

Pengumpulan data volume produk olahan unit pengolahan ikan dan utilitas tahun 2024 dilaksanakan di 38 Provinsi di Indonesia. Pendataan dilakukan terhadap 13 (tigabelas) jenis kegiatan UPI meliputi: 1) pendinginan/pengesanikan, 2) pembekuan ikan, 3) penggaraman/pengeringan ikan, 4) pemindangan ikan, 5) pengasapan/pemanggangan ikan, 6) peragian/fermentasi ikan, 7) pengalengan ikan, 8) pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi, 9) pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, 10) pembuatan minyak ikan, 11) pengolahan rumput laut, 12) penanganan ikan, dan 13) pengolahan ikan lainnya. Data yang disajikan adalah data volume produk olahan dan volume produk setara segar per bulan per kab/kota.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	-	1,67	-	3,71	-	1,95	-	1,95	116,77	52,56	-	-

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa indikator kinerja Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan bersifat semesteran sehingga pada triwulan III 2025 belum terdapat capaian dan baru akan terlihat di triwulan IV 2025. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat semesteran. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 363.661.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp 259.525.170,- atau sebesar 71,36% dari pagu anggaran pasca blokir.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan III 2025, yaitu:

- Terdapat perbedaan format data yang diperoleh dari instansi terkait, sehingga perlu waktu untuk melakukan cleansing data.
- Data kapasitas terpasang UPI MB sebagai dasar penghitungan utilitas perlu dilakukan pembaharuan

Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan III adalah adanya koordinasi yang cukup baik antar unit kerja dan K/L dalam hal penyediaan, pengolahan, dan analisis data. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, yaitu:

- Perlu koordinasi lebih lanjut dengan BPPMHKP dan BKI dalam sinkronisasi data sebagai dasar penghitungan VPO dan Utilitas UPI MB.
- Pembaharuan data kapasitas terpasang UPI MB serta penghitungan prognosa capaian VPO dan Utilitas MB.

Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan pada triwulan sebelumnya, telah dilaksanakannya kegiatan Persiapan Pendataan Utilitas dan Volume Produk UPI Menengah Besar 2025, dilaksanakan pada tanggal 10 September 2025. Dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh perwakilan dari BPPMHKP dan BKI, sehingga data yang diperlukan untuk perhitungan VPO dan Utilitas dapat terpenuhi.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Persiapan Pendataan Utilitas dan Volume Produk UPI Menengah Besar 2025

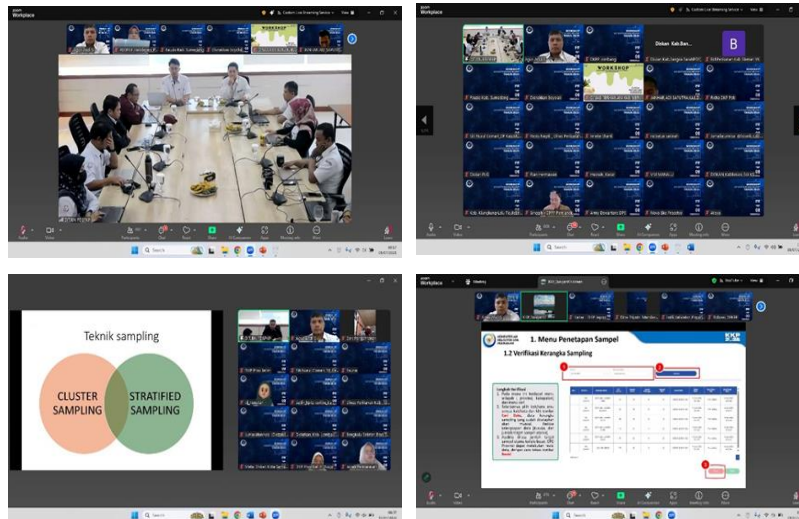
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2025 di RR. Pembinaan Mutu Direktorat Pengolahan. Kegiatan dihadiri oleh, Ketua Tim Kerja PUP2MB dan perwakilan dari Badan Karantina Indonesia serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyepakati data yang telah dikirimkan oleh Badan Pengendalian dan mempersiapkan pendataan. Data untuk perhitungan VPO dan Utilitas diperoleh dari BKI dan BPPMHKP. Beberapa tantangan terkait pencatatan dan perbedaan data turut dibahas. Pentingnya koordinasi dengan badan mutu untuk pendataan kapasitas UPI MB juga ditekankan, agar dapat dikolaborasikan saat pengajuan izin. Pendataan UPI MB akan dilakukan melalui self report dan kolaborasi webinar.



Gambar 29. Persiapan Pendataan Utilitas dan Volume Produk UPI Menengah Besar 2025

2. Sosialisasi Pendataan Volume Produk Olahan UPI Mikro-Kecil pada Kegiatan Workshop satu data bidang PDSPKP tahun 2025

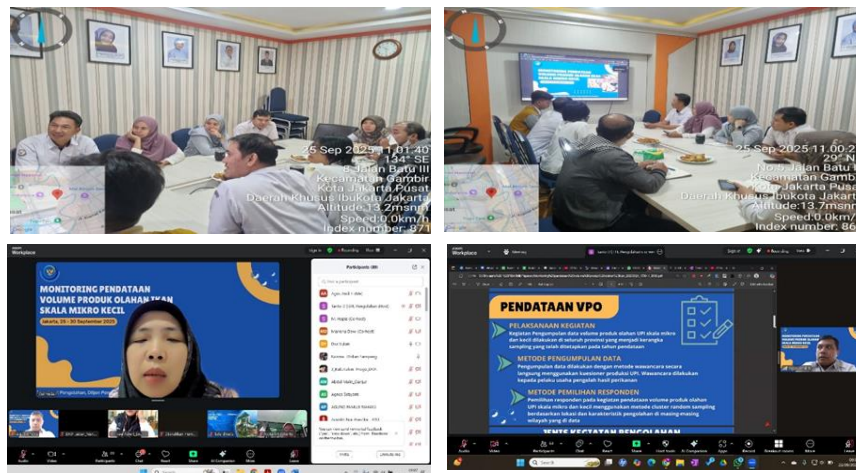
Kegiatan berlangsung dari tanggal 8-10 Juli 2025 secara *hybrid*. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pusdatin, validator pusat, validator provinsi, validator kab/kota, dan enumerator dari Dinas KP dan Penyuluh KP. Tujuan kegiatan adalah pelatihan untuk validator dan enumerator mengenai pendataan bidang PDSPKP menggunakan aplikasi Portaldata KKP. Pendataan ini mencakup kusuka pengolah dan pemasar, Volume Produk Olahan (VPO), gudang ikan, stok ikan, dan harga ikan eceran. Petugas Pendataan akan melakukan input dan validasi data, serta memutakhirkan data kusuka. Kerangka sampel untuk pendataan VPO ditentukan oleh validator pusat dan provinsi. Database gudang beku dapat diakses validator daerah dan diupdate oleh enumerator. Uji coba aplikasi Portaldata KKP dapat dilakukan hingga 21 Juli 2025. Pendataan harga ikan dilakukan melalui pemilihan jenis ikan, pasar, dan pedagang, dengan target 5 jenis ikan per bulan. Setelah 21 Juli 2025, petugas harus menginput data dari Januari hingga Juni 2025 secara berkala. Koordinasi aktif antara validator dan petugas pendataan sangat diperlukan.



Gambar 30. Sosialisasi Pendataan Volume Produk Olahan UPI Mikro-Kecil pada Kegiatan Workshop satu data bidang PDSPKP tahun 2025

3. Monitoring dan Updating Pendataan VPO Skala Mikro Kecil Tahun 2025 (Semester I tahun 2025)

Kegiatan dilaksanakan tanggal 25-30 September 2025, secara online. Peserta kegiatan termasuk perwakilan dari beberapa instansi dan petugas enumerator dari Kabupaten/Kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan monitoring dan updating data Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan, serta menyinkronkan dan mengidentifikasi kendala dalam pendataan. Pendataan dilakukan oleh petugas enumerator yang mengikuti pedoman resmi. Monitoring dibagi dalam empat wilayah provinsi, dengan tim yang terdiri dari validator dan enumerator. Namun, beberapa provinsi belum mengirimkan dokumen dan melakukan validasi data. Kendala yang dihadapi termasuk pergantian petugas, data yang belum mutakhir, kendala sistem input data, serta efisiensi anggaran. Kesimpulannya, diperlukan koordinasi untuk mempercepat pengumpulan data, sosialisasi soal penginputan data, dan validasi nasional oleh Pusdatin KKP pada M-4 Oktober 2025.



Gambar 31. Monitoring dan Updating Pendataan VPO Skala Mikro Kecil Tahun 2025 (Semester I tahun 2025)

IK 5. Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan

Unit Bantuan Pemerintah yang dimanfaatkan oleh penerima bantuan yang diadakan pada tahun berjalan. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem rantai dingin, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta mendukung pencapaian produksi olahan hasil kelautan dan perikanan, khususnya bagi pelaku UMK Pengolahan, pada tahun 2025 Direktorat Pengolahan memfasilitasi pemberian Bantuan Pemerintah berupa *chest freezer* dan peralatan pengolahan. Pemberian bantuan ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat kapasitas produksi dan menjaga mutu produk olahan, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha pengolahan di tingkat lokal maupun nasional. Melalui dukungan sarana tersebut, diharapkan para pelaku pengolahan, utamanya UPI pengolahan skala mikro dan kecil dapat lebih optimal dalam menerapkan standar kualitas, memperpanjang masa simpan produk, serta meningkatkan efisiensi proses produksi.

Capaian dari fasilitasi bantuan pemerintah ini diukur melalui Indikator Kinerja "Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan". Indikator ini mencerminkan sejauh mana bantuan yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh penerima untuk mendukung kegiatan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, baik dalam meningkatkan volume produksi, mutu produk, maupun kontribusi terhadap pertumbuhan usaha pengolahan di daerah. Dengan demikian, keterhubungan antara program bantuan pemerintah dengan indikator ini sangat erat, karena tingkat pemanfaatan bantuan menjadi parameter keberhasilan program dalam mendukung

target strategis Direktorat Pengolahan. Realisasi indikator ini juga menjadi bagian penting dalam evaluasi efektivitas program dan penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran.

Target pemanfaatan bantuan pemerintah pada Triwulan III adalah belum ada (0%), dikarenakan pada triwulan ini kegiatan masih dalam tahap pengadaan dan proses penyaluran penyaluran bantuan.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan tahun 2025 ditargetkan mencapai 80%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, yang capaiannya akan diukur pada Triwulan IV, terdapat perbedaan pengukuran pada triwulan II dan triwulan III dikarenakan perubahan target pengukuran Bantuan Pemerintah dari tahun berjalan menjadi Bantuan Pemerintah di tahun 2024. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan sebesar Rp 3.046.201.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp 225.096.300,- atau sebesar 7,39% dari pagu anggaran pasca blokir.

Pada pelaksanaan kegiatan di Triwulan III, terdapat beberapa kendala yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja Dit. Pengolahan, antara lain: usulan kelompok Penerima yang masih berproses dan kelengkapan

persyaratan calon penerima yang belum lengkap, serta baru selesainya proses revisi RKAKL pada bulan Juli 2025.

Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan III 2025, adalah Ketersediaan Produk di e-Katalog yang Sesuai Spesifikasi, dan koordinasi antar unit di internal Dit. Pengolahan, dengan mitra, serta pihak terkait lainnya berjalan lancar untuk menyelesaikan tantangan/kendala yang muncul.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Triwulan III, Direktorat Pengolahan akan melaksanakan langkah-langkah berikut:

1. Proses pengadaan barang melalui e-Katalog versi terbaru
2. Penetapan penerima manfaat dan jadwal distribusi bantuan
3. Koordinasi lanjutan dengan unit terkait untuk percepatan realisasi, baik pemenuhan kelengkapan persyaratan calon kelompok penerima bantuan, maupun penyelesaian BAST

Dengan demikian, diharapkan pada Triwulan IV, target pemanfaatan bantuan dapat tercapai dan dapat berkontribusi pada upaya keberhasilan program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai upaya percepatan dan penyiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Pemerintah (BP) berupa *Chest Freezer* (CF) dan Peralatan Pengolahan (PP) Tahun Anggaran 2025, Dit. Pengolahan telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendukung selama Triwulan III, antara lain:

1. Rapat Pembahasan Calon Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025, secara luring. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai tim terkait dan dibuka oleh Penanggung Jawab Tim Kerja Prasarana. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas calon penerima bantuan agar sesuai dan siap secara teknis. Dalam pembahasan, disepakati penetapan SK calon penerima dapat dilakukan parsial, dan perlu ada penambahan tugas tim teknis untuk berkoordinasi. Selain itu, penting untuk memperjelas proses penyaluran dan memastikan semua dokumen sesuai. Rencana tindak lanjut mencakup pembuatan surat ke Dinas Kelautan dan Penyusunan SK penerima bantuan.



Gambar 32. Rapat Pembahasan Calon Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2025

2. Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Peralatan Pengolahan Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 di Ruang Rapat Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja dan dihadiri oleh berbagai peserta perwakilan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memperbarui kegiatan dan mengevaluasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah. Pembahasan meliputi revisi anggaran kegiatan pengadaan peralatan. Inspektorat IV menekankan pentingnya kesesuaian pengadaan dengan Juknis. Terdapat masukan untuk menghilangkan jumlah unit peralatan dalam Juknis jika tidak mengganggu rencana kinerja. Persyaratan penerima bantuan harus memiliki kartu KUSUKA. Tugas pengelolaan bantuan harus jelas dan melibatkan semua organisasi terkait. Rapat disimpulkan dengan rencana untuk merevisi Juknis bersama Pembina Mutu dan Analis Pasar Hasil Perikanan.



Gambar 33. Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Peralatan Pengolahan Tahun 2025

3. Rapat Persiapan Pengadaan Sarana Rantai Dingin *Chest Freezer* TA 2025

Tahap I

Rapat dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 di Ruang Rapat Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Rapat dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Ketua Tim Kerja dan Pejabat Pengadaan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mereview paket pengadaan chest freezer serta membahas teknis pengadaan melalui *e-purchasing*. Rencana pengadaan meliputi 19 unit *chest freezer* di 10 lokasi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 145.432.168,-. Barang yang akan disediakan adalah *Chest Freezer* merk Polytron PCF 218 dengan kapasitas 200 liter dan memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25%. Pengadaan dilakukan melalui *e-purchasing* dengan dua cara, yaitu penunjukan langsung dan mini kompetisi. Penunjukan langsung memerlukan justifikasi yang jelas, sedangkan mini kompetisi lebih disarankan. Semua kegiatan dilakukan secara online, dan penyedia harus teliti dalam membaca surat pesanan. Bendahara perlu memiliki akun untuk proses pembayaran, dan pemeriksaan barang harus dilakukan sebelum pengiriman. Jika ada beberapa tahap, metode penentuan penyedia dapat berubah berdasarkan evaluasi sebelumnya. Rapat menyimpulkan untuk segera memproses pengadaan *chest freezer* melalui e-katalog.



Gambar 34. Rapat Persiapan Pengadaan Sarana Rantai Dingin *Chest Freezer* TA 2025
Tahap I

4. Rapat Pembahasan Paket dan Spesifikasi Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan TA 2025

Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Prasarana dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Tujuan pelaksanaan

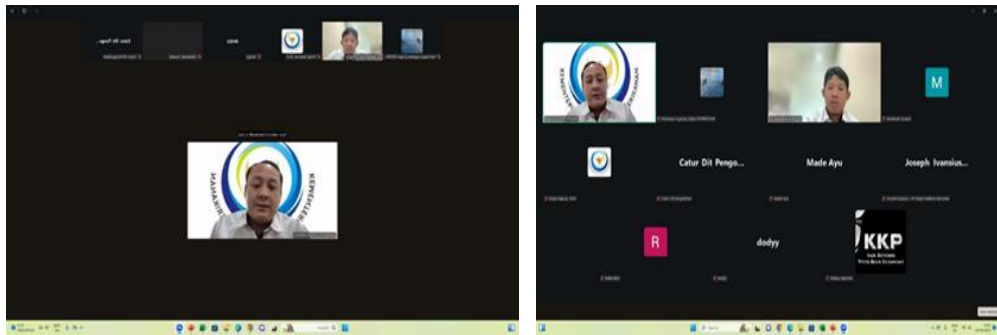
kegiatan adalah mempersiapkan pelaksanaan bantuan pemerintah peralatan pengolahan. Pembahasan mencakup penyesuaian anggaran setelah revisi RKAKL, di mana anggaran rata-rata untuk paket peralatan turun dari Rp 28.000.000,- menjadi Rp 22.837.000,-. Penyesuaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis peralatan yang dibutuhkan dan lokasi calon penerima. Beberapa peralatan yang direkomendasikan untuk dikurangi adalah kompor gas dan panci. Kesimpulan dari rapat adalah perlu revisi Petunjuk Teknis dan pengelompokan komponen peralatan sesuai harga, serta sosialisasi kepada calon penerima bantuan.



Gambar 35. Rapat Pembahasan Paket dan Spesifikasi Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan TA 2025

5. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengadaan *Chest Freezer* (CF) Tahap 1

Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025, dilaksanakan secara daring. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Prasarana dan dihadiri oleh berbagai perwakilan, termasuk dari Inspektorat IV dan PT. Nauli Makmur Bersama. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk berkoordinasi mengenai pengadaan bantuan CF sebanyak 19 unit di 10 lokasi di 6 provinsi. Pemenang tender adalah PT. Nauli Makmur Bersama dengan penawaran Rp. 95.712.555,-. Pengadaan mencakup CF berkapasitas 200 liter dan merek Polytron. Terdapat kendala dalam penentuan batas akhir kontrak yang perlu klarifikasi. Rencana tindak lanjut mencakup pemesanan CF, pengiriman, koordinasi penerimaan barang, dan penyesuaian waktu kontrak jika diperlukan.



Gambar 36. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengadaan *Chest Freezer* (CF) Tahap 1

6. Koordinasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2025 Tahap II

Kegiatan koordinasi dan verifikasi calon penerima bantuan pemerintah *chest freezer* Tahun 2025 tahap II akan dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kota Bogor pada 9 September 2025, Kabupaten Indramayu dan Cianjur pada 10 dan 11 September 2025, serta Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang pada 16 dan 17 September 2025. Peserta kegiatan ini termasuk tim dari Dit. Pengolahan, Dinas Perikanan setempat, penyuluh, dan calon penerima bantuan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memastikan kesesuaian data usulan dengan kondisi riil di lapangan, kelayakan calon penerima, dan dukungan pemerintah daerah untuk keberlanjutan pemanfaatan bantuan. Kegiatan koordinasi dilakukan melalui pertemuan dengan kepala Dinas atau wakilnya untuk membahas kebijakan bantuan, hasil identifikasi kelompok calon penerima, rencana penyaluran, serta dukungan dinas dalam pembinaan pasca bantuan. Dari hasil verifikasi, di Kota Bogor, Poklahsar Ciluar Bahari Sejahtera memproduksi Bandeng Presto dan varian olahan ikan lainnya dengan omzet Rp.20.000.000/tahun, tetapi menghadapi kendala kualitas bahan baku. Di Kabupaten Indramayu, Poklahsar Mawar yang aktif mengolah kerupuk kulit patin dan tuna, memproduksi 200 kg/bulan dan menjualnya dengan omzet Rp28 juta/bulan, namun menghadapi kesulitan dalam bahan baku. Poklahsar Arsy Bantari Tambak dan KUB Agung Jaya juga mengalami kendala harga bahan baku dan sarana penyimpanan. Di Kabupaten Cianjur, Rumbayen dan Munggaran telah memenuhi berbagai syarat administrasi. Di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, sebagian besar dokumen pengajuan bantuan sudah lengkap, meskipun beberapa kelompok masih perlu melengkapi dokumen. Di Kabupaten Serang, semua dokumen juga sebagian besar sudah lengkap. Kesimpulan dari verifikasi ini adalah kebutuhan mendesak akan bantuan chest freezer untuk mendukung rantai dingin dan daya

saing produk, meski administrasi masih perlu perbaikan. Pendampingan oleh penyuluh dibutuhkan untuk penanganan bahan baku, peningkatan administrasi kelompok, dan akses pemasaran melalui penyuluhan kewirausahaan. Proses penetapan penerima bantuan dan pengadaan akan dilakukan melalui ekatalog.



Gambar 37. Koordinasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2025 Tahap II

7. Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis Daerah untuk Penyaluran *Chest Freezer* Tahap 1

Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 secara *hybrid*. Rapat dihadiri oleh tim teknis daerah penerima, dan Itjen IV. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan koordinasi teknis terkait penyaluran bantuan *chest freezer*. Pada 4 September 2025, Direktorat Pengolahan telah melakukan pengadaan 19 unit *chest freezer* untuk 10 kabupaten/kota yang akan disalurkan melalui Dinas setempat yang ditunjuk. Tim teknis memiliki tugas untuk mendampingi proses penyaluran, memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Pengecekan barang harus mencakup spesifikasi, kelengkapan dokumen, dan uji coba operasional setelah 8 jam penerimaan. Hingga

15 September 2025, tiga lokasi telah menerima *chest freezer*, tetapi belum ada uji coba dan serah terima. Tim teknis harus melaporkan kekurangan item kepada Tim Teknis Pusat, dan serah terima barang maksimum dua minggu setelah kedatangan. Uji coba juga perlu dilakukan oleh penerima. Tim Teknis Daerah akan membantu penyaluran dan administrasi.



Gambar 38. Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis Daerah untuk Penyaluran *Chest Freezer* Tahap 1

8. Rapat Finalisasi Revisi Petunjuk Teknis Peralatan Pengolahan TA 2025

Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025 di Ruang Rapat Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara luring. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja dan dihadiri oleh berbagai pejabat terkait. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk finalisasi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Tahun 2025. Pembahasan mencakup penyesuaian anggaran untuk pengadaan peralatan pengolahan berdasarkan Revisi RKAKL TA 2025. Ada penyesuaian pada dasar hukum terkait Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Juknis sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, dengan perubahan jumlah paket bantuan dari 165 menjadi 34 paket. Penambahan baru meliputi unit *insect killer* dan *Solar Table Dryer* di dalam kategori peralatan pengolahan. Direktorat Pengolahan dapat menetapkan Tim Teknis untuk penyaluran bantuan. Tugas penyuluh perikanan

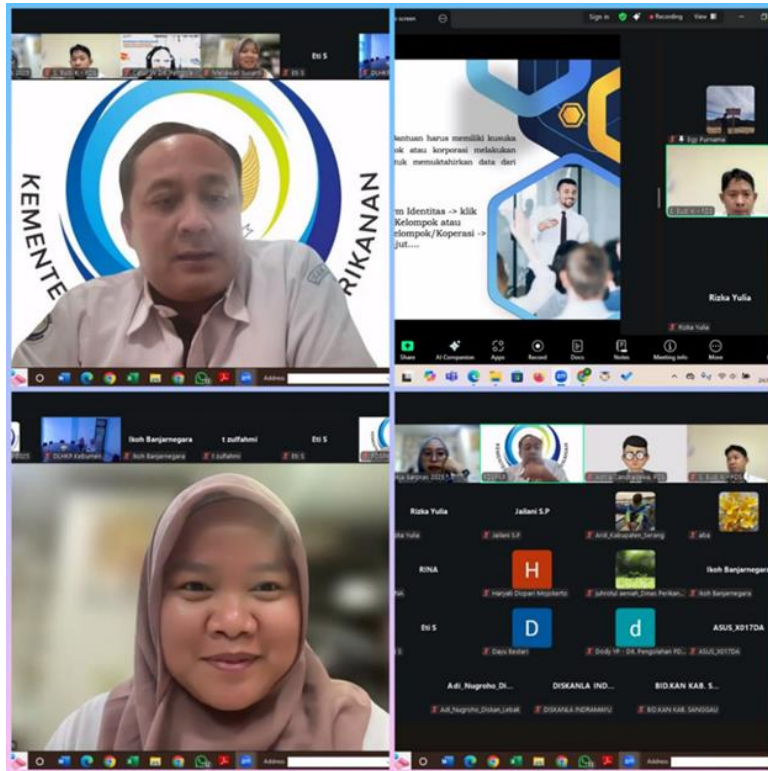
akan disesuaikan dengan Juknis terbaru. Draft perbaikan finalisasi akan diteruskan ke bagian hukum Sesditjen PDSPKP.



Gambar 39. Rapat Finalisasi Revisi Petunjuk Teknis Peralatan Pengolahan TA 2025

9. Rapat Koordinasi dengan Dinas Kabuten/Kota Calon Lokasi Penerima Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2025 Tahap II

Pada tanggal 24 September 2025, diadakan Rapat Koordinasi secara hybrid dengan Dinas Kabupaten/Kota calon lokasi penerima Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2025 Tahap II. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi serta 26 Dinas KP Kabupaten/Kota. Tujuan rapat adalah untuk mempersiapkan penyaluran bantuan tersebut. Pembahasan mencakup spesifikasi, mekanisme penyaluran, persyaratan administrasi, dan hasil verifikasi. Hasil verifikasi menunjukkan sekitar 80% dokumen administrasi sudah lengkap, namun perlu pembaruan beberapa dokumen. Penerima bantuan ditetapkan 58 kelompok dengan total 72 unit dari 95 usulan. Proses upload perbaikan dokumen diharapkan selesai pada 24 September. Dinas diminta untuk memperbarui data KUSUKA dan memastikan kelengkapan administrasi, serta validitas data penerima. Rencana tindak lanjut mencakup koordinasi untuk melengkapi dokumen, penetapan SK Tim Teknis Daerah, dan verifikasi dokumen usulan.



Gambar 40. Rapat Koordinasi dengan Dinas Kabuten/Kota Calon Lokasi Penerima Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2025 Tahap II

10. Rapat Koordinasi Penetapan Calon Lokasi dan Persiapan Pengadaan Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2025 Tahap II

Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 secara luring. Peserta rapat terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi yang terkait. Tujuan rapat adalah untuk melanjutkan pembahasan dari rapat sebelumnya mengenai Dinas Kabupaten/Kota calon penerima bantuan. Wakil Direktorat Pengolahan melaporkan bahwa 80% dokumen untuk bantuan sudah lengkap, namun beberapa perlu diperbarui. Sebanyak 58 kelompok di 26 Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai penerima, dari 95 usulan yang masuk. Dokumen persyaratan administrasi harus diperbaiki hingga 24 September agar proses pengadaan dapat dilakukan pada 26 September. Disepakati bahwa SK penetapan lokasi mengikuti format sebelumnya, dan proses pengadaan dapat segera dilaksanakan.



Gambar 41. Rapat Koordinasi Penetapan Calon Lokasi dan Persiapan Pengadaan Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2025 Tahap II

IK 6. Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah

Diversifikasi produk merupakan salah satu upaya untuk menambah nilai hasil perikanan sesuai yang diamanahkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Diversifikasi produk dilakukan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyesuaikan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar.

Diversifikasi produk yg dibina menuju penerapan diversifikasi produk dan / kemasan bernilai tambah kepada pelaku usaha pengolahan skala mikro,kecil dan menengah agar produk dapat diadopsi, diduplikasi direplikasi dan diproduksi untuk menambah nilai.

Persentase pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah yang telah diperkenalkan diversifikasi produk bernilai tambah, dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah diperkenalkan pada Triwulan II telah tercapai 30% dari total target tahunan, dibandingkan dengan pelaku usaha yang ditargetkan dalam rencana kerja Ditjen PDSPKP tahun 2025.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah	33	30	-	100	33,52	30	10	-	101,58	33,52	-	-

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja (IK) Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah pada Triwulan III 2025 adalah sebesar 33,52% atau setara 101,58% dengan target Triwulan III 2025 yakni 33%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka setara 33,52% dengan target tahun 2025 yakni 100%. Jika dibandingkan dengan target Triwulan II 2025 maka setara dengan 112%. Indikator Kinerja (IK) tersebut adalah bersifat triwulanan. IK tersebut pada periode yang sama di tahun 2024 bernama Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk dengan satuan UMKM. Terdapat perbedaan satuan antara Triwulan III 2025 dengan periode yang sama di tahun 2024, sehingga capaian tersebut tidak dapat dibandingkan.

,Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah sebesar Rp 252.323.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 223.874.900,- atau sebesar 88,73 % dari pagu anggaran pasca blokir.

Faktor Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III adalah masih terbatasnya kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil dalam memahami teknik diversifikasi produk dan pengemasan modern, dan sebagian besar pelaku usaha skala mikro belum memiliki standar mutu dan formula produk yang konsisten, sehingga

sulit mempertahankan kualitas hasil olahan dan Keterbatasan akses teknologi dan bahan baku pengolahan sederhana (seperti alat vacuum sealer, mixer industri, dan mesin pengemasan).

Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III 2025, yaitu:

- a. Terselenggaranya Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan yang meningkatkan wawasan dan keterampilan pelaku usaha.
- b. Capaian output pembinaan diversifikasi dan inovasi pangan dapat dilaksanakan sesuai target.
- c. Adanya antusiasme tinggi dari pelaku usaha untuk mengadopsi produk olahan baru berbasis hasil perikanan lokal.
- d. Kolaborasi aktif dengan mitra industri, lembaga riset, dan akademisi dalam penerapan inovasi teknologi pengolahan.
- e. Pendekatan pembinaan berbasis praktik langsung membuat pelaku usaha lebih mudah memahami teknik inovasi produk dan kemasan.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya, yaitu :

- a. Melanjutkan pembinaan melalui pendampingan teknis berkelanjutan di lapangan agar pelaku usaha dapat mempraktikkan hasil pelatihan.
- b. Meningkatkan pelatihan inovasi kemasan dan produk agar sesuai dengan tren pasar dan standar keamanan pangan.

Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan pada triwulan sebelumnya yaitu:

- a. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada Bulan Juli-September 2025
- b. Kegiatan workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Karawang, Dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Mikro dan Kecil yang dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Agustus 2025 di Brits Hotel Karawang.
- c. Dilaksanakan rapat calon investor UPI dalam rangka operasionalisasi dan optimalisasi UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan
- d. Pada tanggal 07 Juli 2025 telah disampaikan surat kepada Dinas Perikanan Kota Pekalongan, karena dilaksanakannya factory trial di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan pada tanggal 22-25 April 2025 sebagaimana surat kami sebelumnya nomor 1323/DJPDSPKP.4/PDS.240/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, Direktorat Pengolahan telah menyusun Standar Operating Procedure (SOP) penggunaan

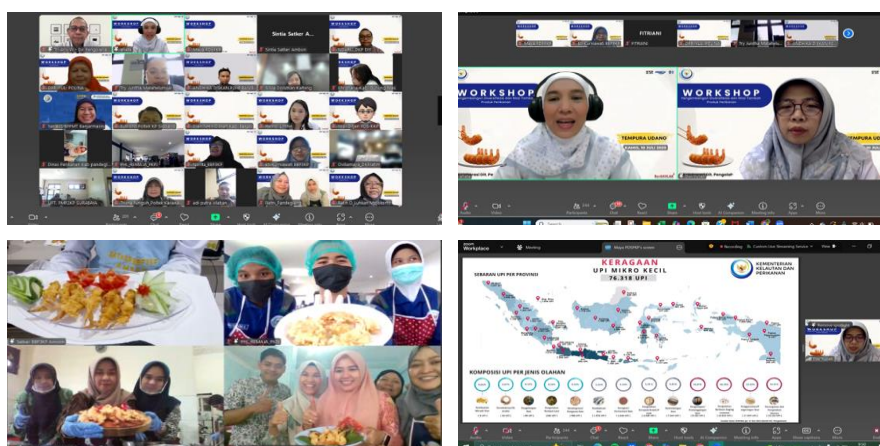
alat dan alur proses pembuatan Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Standar Operating Procedure tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut https://bit.ly/SOP_HPI_Pekalongan.

- e. Pembinaan kepada Dinas Perikanan Kota Pekalongan, untuk segera mengoperasikan bantuan UPI HPI Pekalongan melalui rapat akselerasi dan asistensi UPI pada Tanggal 26 Agustus 2025.
- f. Pada Bulan September Timja Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan, Direktorat Pengolahan, telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi terkait fortifikasi produk HPI, pada kegiatan tersebut Kutai Kartanegara berminat untuk membeli pada UPI Pekalongan untuk penanganan stunting di Kutai Kartanegara.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Tempura Udang

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 secara *online* melalui Zoom dan YouTube. Kegiatan ini diikuti oleh 278 peserta melalui Zoom dan 27 peserta melalui *livestream* YouTube dari 38 provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mendukung hilirisasi dan industrialisasi nilai tambah, serta memberikan wawasan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan dilaksanakannya *Workshop* juga memperkenalkan tempura udang ke UKM, pelajar, dan masyarakat umum, serta mendukung pengolahan di Sumatera Selatan dan Maluku Tenggara. Peserta menunjukkan antusiasme dengan banyak pertanyaan tentang produk tempura udang.



Gambar 42. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Tempura Udang

2. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Sirup Rumput Laut

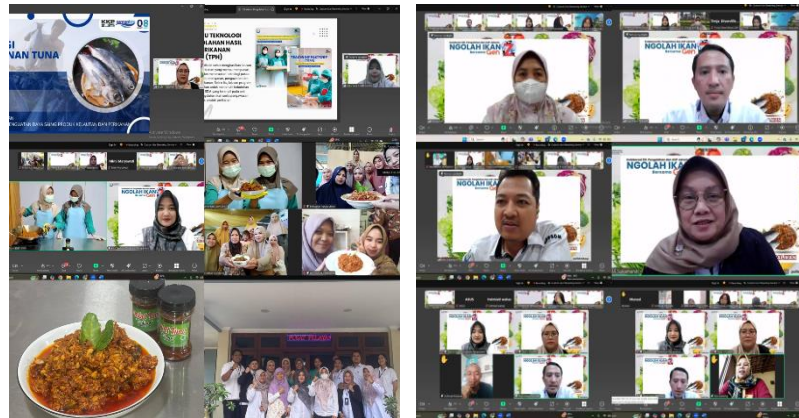
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 secara *online*. Kegiatan ini diikuti oleh 471 peserta melalui Zoom dan 81 melalui YouTube dari 38 Provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman tentang diversifikasi produk rumput laut, khususnya pengolahan menjadi sirup yang inovatif dan bernilai tinggi. Materi dibahas meliputi penerapan SNI produk perikanan, logistik bahan baku rumput laut, dan praktik pembuatan sirup. Sirup rumput laut menjadi minuman tinggi serat yang bisa diproduksi oleh UMKM dengan modal rendah dan potensi keuntungan tinggi.



Gambar 43. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Sirup Rumput Laut

3. Workshop Ngolah Ikan Bersama Gen Z : Sambal Ikan

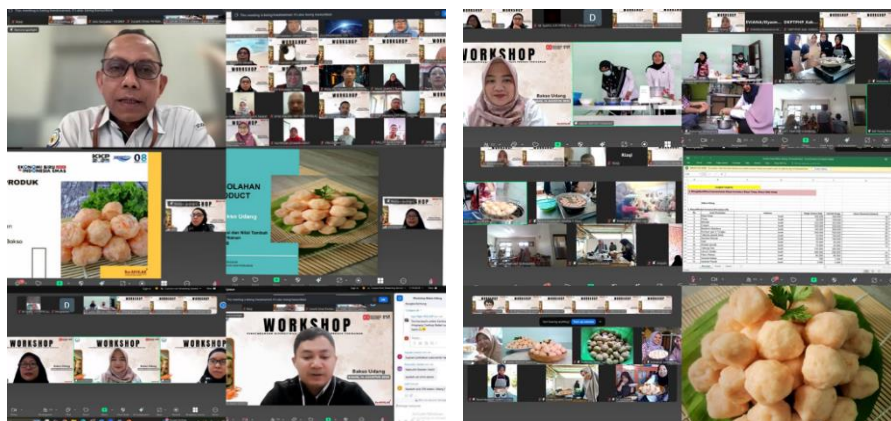
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025 secara online melalui *Zoom Meeting* dan YouTube. Kegiatan ini diikuti oleh 667 peserta melalui *Zoom Meeting* dan 50 peserta melalui saluran YouTube dari 38 provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberi pemahaman kepada generasi Z tentang diversifikasi produk dari ikan, khususnya pengolahan Ikan Tuna menjadi sambal yang bernilai tinggi, serta mendorong kreativitas dari generasi Z. Dalam acara ini disampaikan dua materi, satu testimoni, dan satu praktik pengolahan sambal oleh narasumber dan alumni. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, peserta terinspirasi untuk mengaplikasikan cara mengolah produk berbasis kelautan dan perikanan yang baru dan menarik.



Gambar 44. Workshop Ngolah Ikan Bersama Gen Z : Sambal Ikan

4. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Bakso Udang

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025 secara online. Kegiatan ini diikuti oleh 323 peserta melalui *Zoom Meeting* dan 186 melalui YouTube dari 38 provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi UMKM dalam mengolah udang menjadi bakso berkualitas tinggi dan bernilai jual. Materi yang dibahas mencakup SNI produk Bakso Ikan dan teknologi pengolahan *Fish Jelly*, diikuti dengan praktik pengolahan bakso udang. Peserta menunjukkan antusiasme dan memperoleh ilmu baru tentang cara membuat bakso yang kenyal dan matang sempurna.

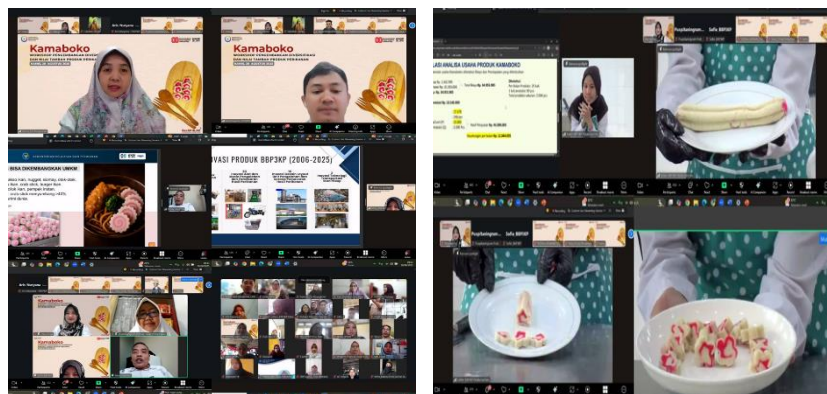


Gambar 45. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah
Produk Perikanan Edisi : Bakso Udang

5. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Kamaboko

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025, secara online melalui *Zoom Meeting* dan *streaming Youtube*. Kegiatan ini diikuti oleh 547 peserta melalui Zoom

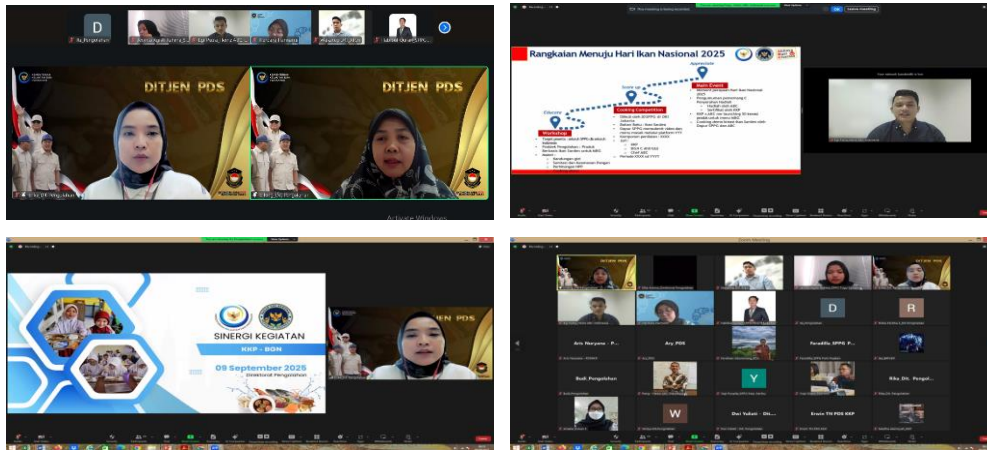
dan 67 peserta melalui YouTube dari 38 provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pemahaman tentang diversifikasi produk berbasis surimi agar menciptakan produk inovatif dan bernilai jual tinggi. Pembahasan mencakup dua materi tentang peluang pasar dan teknik pengolahan kamaboko, serta praktik pengolahan kamaboko. Workshop ini memberi kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan produk olahan baru.



Gambar 46. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Kamaboko

6. Rapat Kolaborasi Penanganan dan Pengolahan Ikan Dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2025 melalui *Zoom Meeting*. Rapat ini dipimpin oleh Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai SPPG dan PT Heinz ABC Indonesia. Tujuan rapat adalah membahas rencana kolaborasi penanganan dan pengolahan ikan di Jakarta. Kolaborasi ini terdiri dari tiga kegiatan: pelatihan penanganan dan pengolahan ikan, lomba inovasi olahan berbasis ikan sarden untuk acara Makan Bersama Gratis (MBG), dan lomba video memasak berbasis ikan sarden. Pelatihan akan diikuti oleh 500-1000 peserta dari SPPG di seluruh Indonesia, berlangsung dari September hingga November 2025. Lomba inovasi akan melibatkan 20 peserta dari DKI Jakarta dan diadakan di dapur PT ABC Heinz pada Oktober 2025. Juri lomba terdiri dari KKP, BGN, dan Chef PT ABC Heinz. Lomba video memasak terbuka untuk semua SPPG di Indonesia dengan durasi video maksimal 2 menit. Pemenang lomba akan diumumkan saat Hari Ikan Nasional 2025, dan pelaksanaan lomba serta publikasi akan melibatkan tim humas terkait.



Gambar 47. Rapat Kolaborasi Penanganan dan Pengolahan Ikan Dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

7. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Cookies Rumput Laut

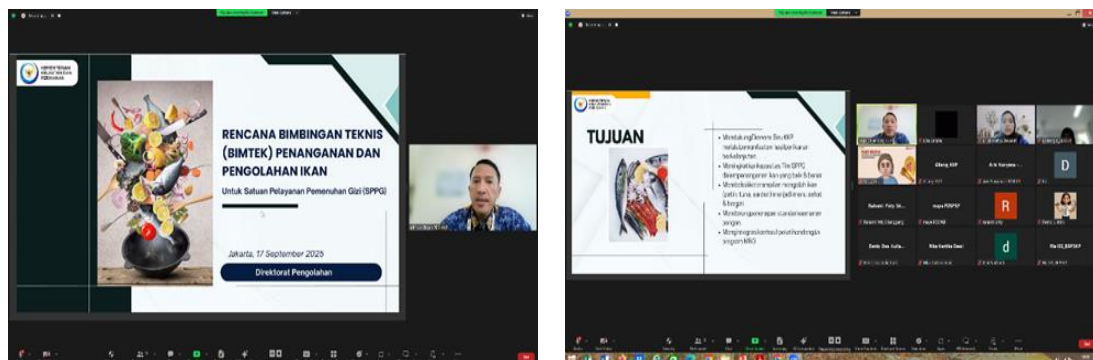
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2025 melalui *Zoom Meeting* dan Youtube. Kegiatan ini diikuti oleh 575 peserta melalui *Zoom Meeting* dan 49 peserta melalui Youtube dari 38 Provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pemahaman teknis tentang diversifikasi produk berbasis rumput laut agar dapat menjadi produk inovatif yang bernilai tinggi. Materi termasuk edukasi literasi keuangan untuk UMKM, strategi akses pasar, dan praktik pengolahan cookies rumput laut. Cookies rumput laut menawarkan peluang baru dalam industri makanan.



Gambar 48. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi : Cookies Rumput Laut

8. Rapat Persiapan Pelatihan Penanganan dan Pengolahan Ikan Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025, melalui Zoom Meeting. Rapat dipimpin oleh Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan dihadiri oleh perwakilan dari BBP3KP dan berbagai Tim Kerja di Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan rapat adalah untuk membahas persiapan pelatihan penanganan dan pengolahan ikan. Pelatihan akan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama diadakan pada bulan Oktober 2025, membahas pengenalan penanganan ikan segar dan praktik higienis secara online. Tahap kedua juga di bulan Oktober 2025, fokus pada standarisasi bahan baku dan teknik pengolahan ikan untuk menu berbasis tuna. Tahap ketiga digelar pada bulan November 2025 secara luring di PT. ABC Heinz, membahas GMP SSOP, bahan tambahan pangan, dan penyimpanan ikan. Selain itu, ada lomba video memasak dari bulan Oktober hingga November 2025 untuk peserta SPPG yang akan membuat video olahan berbasis ikan sarden. Diskusi juga mencakup waktu pelatihan pada akhir pekan, jenis ikan yang digunakan tergantung pada ketersediaan lokal, dan kesesuaian peralatan memasak yang ada. Kesimpulannya, bimbingan teknis akan dilakukan dalam tiga tahap dengan materi yang berbeda.



Gambar 49. Rapat Persiapan Pelatihan Penanganan dan Pengolahan Ikan Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

9. Webinar Mikroalga : Inovasi dan Ragam Pemanfaatan Spirulina

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 melalui *Zoom Meeting* dan YouTube. Kegiatan ini diikuti oleh 360 peserta melalui *Zoom Meeting* dan 89 peserta melalui YouTube dari 38 Provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendorong inovasi produk bernilai tambah, seperti makanan fungsional, suplemen, dan kosmetik, serta menjadi sarana pertukaran pengetahuan antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam industri mikroalga. Sebagai narasumber dalam pelaksanaan webinar yaitu, Marianti A. Manggau dan Falasifah, yang membahas

potensi Spirulina sebagai pangan bergizi dan ramah lingkungan. Spirulina telah diakui oleh WHO dan memiliki banyak aplikasi, termasuk sebagai bahan baku kosmetik dan pakan. PT Albitech, yang menerapkan proses ramah lingkungan, memiliki berbagai sertifikasi.

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit kerja Direktorat Pengolahan sampai dengan waktu pengukuran.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	95	95	80	95	100	100	100	100	105,26	105,26	-	-

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%) tahun 2025 ditargetkan sebesar 95% sedangkan target Triwulan III adalah sebesar 95%. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2024 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025. Perhitungannya adalah triwulanan, capaian indikator kinerja

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%) pada Triwulan III tahun 2025 adalah 100% atau setara 105,26% dengan target Triwulan III 2025 yakni 95%, dan setara dengan 105,26% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 95%. Capaian pada triwulan III 2025 sama dengan capaian di Triwulan II 2025 dan di Triwulan III 2024 yakni 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan III 2025, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan

Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti dibanding jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2024.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Penilaian indikator ini dilakukan pada triwulan IV 2025 dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya persamaan antara target tahun 2024 dengan tahun 2024 yaitu 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan III antara lain:

1. Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 9. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a)memiliki dampak langsungdanbesar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden;dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-

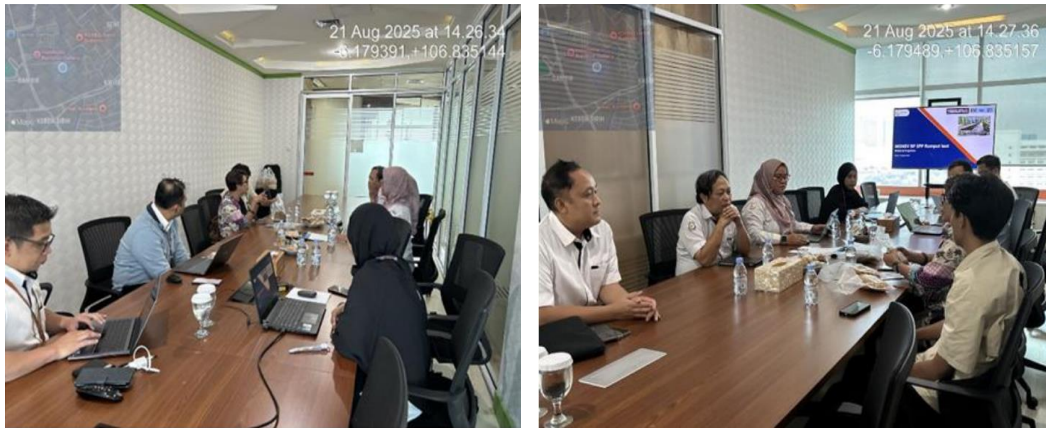
Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan III yaitu:

1. Rapat Monev Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Rumput Laut Kab. Rote Ndao, dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025, secara luring bertempat di Ruang Rapat Setditjen PDSPKP. Rapat dihadiri oleh penerima bantuan SPP Rumput Laut (Yayasan Vokasi Nusa Tenggara) dan PJ beserta Pelaksana Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana pasca panen rumput laut (BP SPP Rumput Laut) di Kab. Rote Ndao. Berdasarkan laporan dari pihak Yayasan Vokasi Nusa Tenggara, gudang jemur dan sarana pasca panen yang dibangun tahun 2024 sudah dimanfaatkan secara penuh oleh Yayasan Vokasi. Untuk pengembangan “modelling rumput laut” di Rote Ndao, pihak Yayasan Vokasi Nusa Tenggara telah melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Membangun Galeri Rumput Laut sebagai etalase produk, pusat edukasi, dan wisata berbasis perikanan.
- b. Mencatat produksi dari pembudidaya secara detil sehingga memudahkan “traceability”
- c. Membangun branding rumput laut Rote Ndao yang ramah lingkungan dan organik
- d. Yayasan Vokasi Nusa Tenggara mempunyai rencana untuk pabrik rumput laut di Rote Ndao. Untuk itu sedang dirintis kebun – kebun bibit dan gudang / tempat pengolahan rumput laut.

Beberapa permasalahan yang masih menghambat pengembangan rumput laut di Rote Ndao, yaitu biaya logistik dari Rote Ndao / Nusa Tenggara masih relatif cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, pihak Yayasan Vokasi Nusa Tenggara mengharapkan hal – hal sebagai berikut :

- Optimalisasi Galeri Rumput Laut sebagai pusat promosi, edukasi, dan branding daerah untuk memperkuat posisi Rote Ndao sebagai sentra rumput laut nasional dan ekspor.
- Membantu pemasaran produk rumput laut dari Rote Ndao.



Gambar 50. Rapat Monev Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Rumput Laut

IK 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Pengolahan sebesar 86, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan III. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. Adanya peningkatan target tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar 2 poin atau meningkat 2,38% dari target tahun 2024.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan III antara lain:

1. Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025, dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juli 2025
2. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025, dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025.
3. Pengukuran dan verifikasi Capaian Kinerja organisasi lingkup Ditjen PDSPKP Periode II Tahun anggaran 2025, dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025.
4. Penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian IKU yang tidak mencapai target pada triwulan I tahun 2025 (IKU Ekspor), dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025.

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	s.d. TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	82	-	81	-	84,23	-	84,23	103	97	-	-

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan bersifat semesteran, sehingga pada triwulan III 2025 belum terdapat capaian dan baru akan terlihat di triwulan IV 2025. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2024 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya penurunan target tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar 6 poin atau 6,90% dari target tahun 2024

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan III antara lain:

1. Melakukan pemantauan nilai IP ASN Organisasi,
2. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
3. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

3.3. Realisasi Anggaran

Direktorat Pengolahan mendapatkan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp 11.705.464.000, dari anggaran awal sebesar Rp 15.528.807.000, pagu efektif Rp.3.823.343.000. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp 1.032.094.142,- atau setara dengan 26,99% dari pagu setelah AA.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan Triwulan III 2025

No	Rincian Output	Blokir Automatic Adjusment (Rp)	Pagu setelah AA	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran dari Pagu setelah AA
1	Persentase Utilitas industri pengolahan produk KP	2.800.000	267.578.000	99.063.224	61,93%
2	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI	13.000	102.655.000	14.766.443	85,60%
3	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautandan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP	-	44.666.000	1.297.606	97,09%
4	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	-	58.503.000	23.896.100	59,15%
5	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	3.046.201.000	2.821.104.700	7,39%
6	Persentase Pelaku Usaha Yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk Dan / Atau Kemasan Bernilai Tambah	-	252.323.000	28.833.100	88,57%

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dari Juli sampai dengan September 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerjaku pada Triwulan III sebesar 105,61. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 adanya penurunan 1,64 poin atau -1,53%, dan jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar 0,52 poin atau 0,49%. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan III diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%); target 75%; capaian 75% atau 100% dari target.
- IKK Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (%); target 23%; capaian 28,31% atau 120% dari target.
- IKK Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (%); target 33%; capaian 33,52% atau 101,58% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 100% atau 105,26% dari target.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pada triwulan III 2025, yaitu:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	Rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kelayakan dasar penanganan dan pengolahan serta sertifikasi produk perikanan	Pemberian pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha difasilitasi melalui edukasi (penyebarluasan informasi melalui media sosial, kegiatan klinik mutu di bazar atau sosialisasi) dan pembinaan langsung kepada pelaku usaha perikanan
Produksi Kelautan Perikanan Olahan dan	• Terdapat perbedaan format data yang diperoleh dari instansi terkait, sehingga perlu waktu untuk melakukan cleansing data. • Data kapasitas terpasang UPI MB sebagai dasar penghitungan utilitas perlu dilakukan pembaharuan	• Perlu koordinasi lebih lanjut dengan BPPMHKP dan BKI dalam sinkronisasi data sebagai dasar penghitungan VPO dan Utilitas UPI MB. • Pembaharuan data kapasitas terpasang UPI MB serta penghitungan prognosa capaian VPO dan Utilitas MB.

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025 yang telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2025	Tindak Lanjut
• Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi UPI yang diperlukan sebagai dasar untuk penetapan populasi, baik dari segi waktu dan kelengkapan datanya • Terdapat perbedaan format data yang diperoleh dari instansi terkait, sehingga perlu waktu untuk melakukan cleansing data	• Penetapan kerangka sample untuk penghitungan VPO dan Utilitas UPI MB yang dilengkapi dengan data dukung • Permohonan Data Lalu Lintas Domestik dan Ekspor Triwulan III Tahun 2025; Koordinasi Tim Analisis Data.

Bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tautan SAKIP dengan folder Level 2 PBM (https://drive.google.com/drive/folders/1qWSv4JE5PhuEBLjYVa6fW8DK5FqH_ddf).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terka hit sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

4.4. Lampiran



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMIL E (021) 3500132
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGOLAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tri Aris Wibowo**
Jabatan : **Direktur Pengolahan**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Tornanda Syaifullah**
Jabatan : **Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu,
Direktur Pengolahan



Tornanda Syaifullah



Tri Aris Wibowo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGOLAHAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,7
		2.	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (Persen)	100
		3.	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (Persen)	100
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	4.	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton)	3,71
		5.	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	80
		6.	Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen)	100
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	81
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	81

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
<i>PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</i>	
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	15.528.807.000
Total Anggaran Direktorat Pengolahan Tahun 2025	15.528.807.000

Jakarta, 02 Juli 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan


Tornanda Syarifullah

Pihak Kesatu,
Direktur Pengolahan


Tri Aris Wibowo